

# Kata Pengantar

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Bantul. Proses perencanaan di Kabupaten Bantul diharapkan mengacu pada GDPK yang telah disusun, sehingga seluruh sistem perencanaan dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan komprehensif. Secara operasional, *grand design* ini merupakan bagian integral dari pembangunan di berbagai bidang dalam rangka memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan.

*Grand design* pembangunan adalah gambaran kuantitas dan kualitas penduduk pada masa kini, untuk selanjutnya diproyeksikan kondisinya pada masa depan. Dalam *Grand design* juga memuat *roadmap* yang menjadi tujuan dan arah kebijakan bagi pembangunan kependudukan hingga tahun 2035. Dalam *grand design* terdapat lima pilar penting yang dibahas yakni pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan pengembangan sistem informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi. Diharapkan ke depan akan terwujud penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

Kabupaten Bantul diharapkan mencapai penduduk tumbuh seimbang (PTS). Pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan keluarga dimaksudkan mampu mewujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Terkait dengan mobilitas penduduk, persebaran penduduk yang lebih merata, perlu adanya pengembangan pusat ekonomi baru sehingga persebaran penduduk dapat merata. Selain itu, tersusunnya sistem informasi data kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2035 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam upaya penyelesaian dokumen ini, kami menyadari dokumen ini belum sempurna dan masih membutuhkan masukan berbagai pihak demi penyempurnaannya.

Bantul, September 2018

Tim Penyusun GDPK Kabupaten Bantul

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Visi.....	7
1.4 Misi.....	8
1.5 Arah Kebijakan.....	9
1.6 Maksud dan Tujuan .....	9
1.6.1 Maksud Penyusunan GDPK Kabupaten Bantul.....	9
1.6.2 Tujuan Penyusunan GDPK Kabupaten Bantul .....	10
1.7 Sasaran Penyusunan GDPK Kabupaten Bantul.....	11
Bab 2 Kondisi Kependudukan Bantul Saat Ini.....	13
2.1 Kuantitas Penduduk.....	14
2.1.1 Jumlah Penduduk dan Perubahannya.....	14
2.1.2 Kepadatan Penduduk.....	16
2.1.3 Rasio Beban Ketergantungan ( <i>Dependency Ratio</i> ).....	19
2.1.4 Piramida Penduduk.....	23
2.1.5 Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> ) .....	26
2.1.6 Kesertaan dalam Program keluarga Berencana.....	28
2.1.6.1 Tingkat Prevalensi Kontrasepsi .....	28

2.1.6.2 Metode Kontrsepsi.....	29
2.1.6.3 <i>Unmetneed</i> (Kebuctuhan Alat Kontrasepsi yang Tidak Terpenuhi) .....	32
2.2 Kualitas Penduduk.....	33
2.2.1 Pendidikan .....	33
2.2.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah.....	33
2.2.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah .....	35
2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	36
2.2.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) .....	38
2.2.1.5 Rasio Guru dan Murid.....	40
2.2.2 Kesehatan .....	42
2.2.2.1 Angka Kematian Ibu .....	42
2.2.2.2 Angka Kematian Bayi.....	42
2.2.2.3 Angka Harapan Hidup (AHH) .....	44
2.2.3 Kemiskinan .....	46
2.2.3.1 Angka Kemiskinan Absolut dan Relatif.....	46
2.2.3.2 Indek Pembangunan Manusia (IPM) .....	48
2.2.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bantul.....	50
2.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	50
2.2.4.2 Kontribusi Sektoral.....	52
2.2.4.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	54
2.2.4.4 Laju Inflasi.....	55
2.2.4.5 Koefisien Gini .....	58
2.2.4.6 PDRB Perkapita.....	60
2.2.4.7 Ketenagakerjaan .....	61
2.3 Pembangunan Keluarga.....	64
2.4 Migrasi Penduduk.....	66
2.5 Data dan Informasi Kependudukan .....	69
Bab 3 Kondisi Kependudukan yang Diinginkan .....	73
3.1 Kuantitas Penduduk.....	73

3.2 Kualitas Penduduk.....	75
3.3 Kondisi Keluarga .....	77
3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk .....	77
3.5 <i>Database</i> Kependudukan .....	77
3.6 Permasalahan dan Tantangan.....	78
<b>Bab 4 <i>Roadmap</i> Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul.....</b>	<b>83</b>
4.1 <i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk .....	83
4.2 <i>Roadmap</i> Pengendalian Kualitas Penduduk.....	84
4.3 <i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga.....	85
4.4 <i>Roadmap</i> Penataan dan Pengarahan Mobilitas .....	86
4.5 <i>Roadmap</i> Pembangunan Basis Data Kependudukan.....	88
<b>Bab 5 Pokok-pokok Kebijakan Kependudukan .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	92
5.2 Kebijakan Pengembangan Kualitas Penduduk .....	93
5.3 Kebijakan Pembangunan Keluarga .....	95
5.4 Kebijakan Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk .....	96
5.5 Kebijakan Pembangunan Basis Data Kependudukan .....	97
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>98</b>

# Daftar Tabel

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2010.....	19
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kelompok Umur dan Rasio Beban Ketergantungan Tahun 2013-2017 .....	22
Tabel 2.3 Distribusi Jenis Kontrasepsi menurut Fasilitas Kesehatan .....	31
Tabel 2.4 Rasio Guru Murid Tahun 013-2017 di Kabupaten Bantul .....	40
Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul .....	64
Tabel 2.6 Perkembangan Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul.....	68
Tabel 4.1 <i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk Bantul Tahun 2018-2035 .....	84
Tabel 4.2 <i>Roadmap</i> Pengendalian Kualitas Penduduk Bantul Tahun 2018-2035 .....	85
Tabel 4.3 <i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul 2018-2035 .....	86
Tabel 4.4 <i>Roadmap</i> Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bantul 2018-2035.....	88
Tabel 4.5 <i>Roadmap</i> Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan Kabupaten Bantul 2018-2035.....	89
Tabel 4.6 <i>Roadmap</i> Pengelolaan Dokumen Kependudukan Kabupaten Bantul 2018-2035.....	91

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Pilar-Pilar Pembangunan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul.....	11
Gambar 2.1	Jumlah Penduduk Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul.....	15
Gambar 2.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017.....	18
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2017.....	25
Gambar 2.4	TFR Kabupaten Bantul Tahun 2013-2035.....	27
Gambar 2.5	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR) Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul .....	29
Gambar 2.6	Persentase Kesertaan PUS dalam ber KB menurut Jenis/Alat Kontrasepsi di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 .....	30
Gambar 2.7	Persentase <i>Unmetneed</i> di Kabupaten Bantul Tahun 2013 - 2017.....	33
Gambar 2.8	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017 .....	34
Gambar 2.9	Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bantul.....	36
Gambar 2.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bantul.....	37
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Bantul.....	39

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bantul Tahun 2013–2017 .....	43
Gambar 2.13 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2013–2017 di Kabupaten Bantul.....	44
Gambar 2.14 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul.....	45
Gambar 2.15 Angka Kemiskinan Absolut dan Angka Kemsikinan Relatif di Kabupaten Bantul Tahun 2013– 2017 .....	47
Gambar 2.16 Perkembangan IPM Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul.....	49
Gambar 2.17 Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) .....	51
Gambar 2.18 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul.....	53
Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul.....	55
Gambar 2.20 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2013-2017 .....	58
Gambar 2.21 Koefisien Gini di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017 .....	60
Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017 .....	61
Gambar 2.23 Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017 .....	63
Gambar 2.24 Data Dasar ( <i>Database</i> ) Kependudukan di Indonesia.....	71

# Bab

# 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah rencana besar pembangunan kependudukan yang di dalamnya berisi arah, tujuan, kebijakan, dan program pembangunan kependudukan dalam jangka panjang. Terdapat lima pilar pokok dalam GDPK yaitu pilar pengendalian kuantitas penduduk, pilar peningkatan kualitas penduduk, pilar pembangunan keluarga, pilar penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan pilar pembangunan administrasi kependudukan. Selanjutnya secara operasional pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang (UU) Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan

keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Bantul telah mengarah pada kondisi optimal yakni struktur penduduk tumbuh seimbang dengan ditandai nilai Angka Kelahiran Total (TFR) yang rendah yakni di bawah angka 2,1. Angka TFR di Kabupaten Bantul tergolong rendah, yakni sebesar 1,6 pada tahun 2000 kemudian sedikit meningkat di tahun 2005 menjadi 1,79 dan pada 2015 menjadi 2,02. Hal yang perlu dipertahankan adalah bahwa angka TFR tersebut masih di bawah angka *replacement* yakni 2,1. Rendahnya TFR dalam jangka panjang adalah modal utama untuk mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Inilah yang disebut dengan *demographic dividend* (bonus demografi) yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menyambut dan mengisi momentum bonus demografi tersebut. Pertanyaan berikutnya, apakah bonus demografi tersebut akan menjadi kenyataan, atau justru menjadi malapetaka karena tingginya angka penganggur. Oleh karenanya, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu *Grand Design* atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud.

Berbagai kebijakan internasional seperti hasil dari ICPD di Kairo tahun 1994, MDGs, SDGs, serta kesepakatan internasional lainnya, menjadi pendukung betapa pentingnya penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya menjadi pedoman pembangunan secara keseluruhan. Pada tingkat nasional, respon terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dituangkan dalam UU No. 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 153 Tahun 2014. Arah kebijakan pembangunan kependudukan yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan

reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana di Indonesia pasca-ICPD. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun *Plan of Action* (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual. Gempita pembangunan kependudukan ditingkat dunia terus berlanjut dengan mensinergikan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang melanjutkan MDGs (*Millenium Development Goals*).

Pada tingkat operasional di Kabupaten Bantul, untuk mengatasi berbagai persoalan yang mengemuka, maka diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) maupun pencapaian target atau sasaran dalam bentuk *Roadmap* Pembangunan Kependudukan (RPK). Aspek-aspek ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mendasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 27 Tahun 2011 tentang penyusunan *Grand Design* terkait Pembangunan Kependudukan, maka terdapat lima bidang yang akan menjadi pilar yaitu sebagai berikut.

1. Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Pilar Pembangunan Keluarga
4. Pilar Pengarahan Mobilitas Penduduk
5. Pilar Pembangunan Manajemen Informasi Kependudukan

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan

kependudukan dengan melihat target pencapaian sampai tahun 2035. Pembangunan di Kabupaten Bantul diharapkan mengacu pada GDPK, sehingga aspek kependudukan menjadi hal yang diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Dokumen mencakup kelima pilar pembangunan dengan dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2035 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan penyusunan GDPK Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33, Pasal 34);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 1.3 Visi

GDPK Kabupaten Bantul yang disusun mendukung komitmen pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 untuk mewujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera. Berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis, visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul antara lain.

- a. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- f. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

## 1.4 Misi

Misi pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. meningkatkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi ini menjadi dasar bagi pencapaian misi pembangunan kependudukan di Kabupaten Bantul. Sejalan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka misi GDPK Kabupaten Bantul 2018-2035 adalah

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
2. mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

3. meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

## 1.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan GDPK Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan
2. Pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat
3. Pembangunan kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penerima hasil pembangunan
4. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
5. Pembangunan kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

## 1.6 Maksud dan Tujuan

### 1.6.1 Maksud Penyusunan GDPK Kabupaten Bantul

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul 2018-2035 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan

pengembangan sistem informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi.

## 1.6.2 Tujuan Penyusunan GDPK Kabupaten Bantul

Penyusunan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul memiliki tujuan sebagai berikut.

1. mewujudkan kondisi penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk
2. mewujudkan penduduk yang berkualitas melalui tiga pilar pembangunan sumberdaya manusia yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang didasari pada kehidupan beragama dan berbudaya
3. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, harmoni, serta mampu merencanakan sumber daya keluarga
4. mewujudkan pencapaian persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5. mewujudkan sistem informasi data kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Selanjutnya secara konseptual, pembangunan kependudukan Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.1** Pilar-Pilar Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul

## 1.7 Sasaran Penyusunan GDPK Kabupaten Bantul

Sasaran dari penyusunan GDPK Kabupaten Bantul adalah mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
2. Pemanfaatan bonus demografi untuk mencapai *the window of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk

3. Keluarga berkualitas dengan mengoptimalkan fungsi keluarga dalam mencapai ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya serta mengoptimalkan sumberdaya keluarga
4. Pembangunan *database* kependudukan dengan berbasis sistem informasi dan teknologi.

## Bab

# 2

## Kondisi Kependudukan Bantul Saat Ini

Permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Dengan jumlah penduduk yang besar akan berdampak pada berbagai bidang, misalnya adanya potensi terjadinya konflik. Selain itu, penduduk yang besar menyebabkan terjadinya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan, penyediaan lapangan pekerjaan karena masih tingginya angka pengangguran, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Perkembangan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar akan memiliki manfaat sebagai modal pembangunan, namun jika tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang baik akan menjadikan penduduk tersebut menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Penanganan masalah kependudukan tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang atau sektor tertentu saja, namun harus dilakukan secara lintas sektoral. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan penyerasian kebijakan kependudukan.

## 2.1 Kuantitas Penduduk

### 2.1.1 Jumlah Penduduk dan Perubahannya

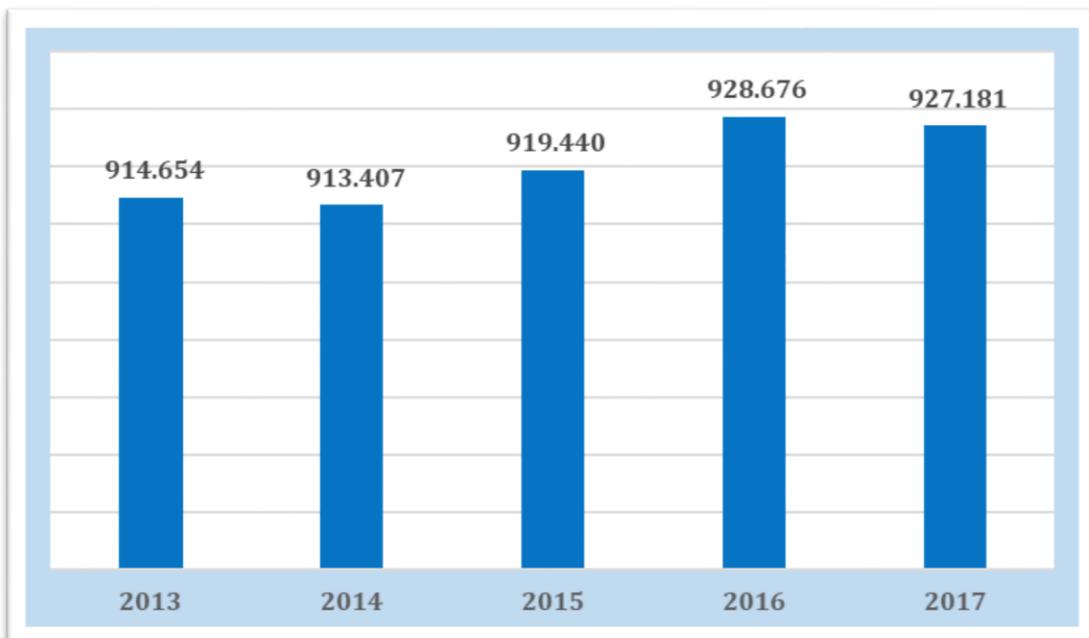
Secara khusus dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan sebagai berikut.

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007).
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

Terkait dengan data kependudukan, karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur tertentu dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan pengendalian penduduk di

Kabupaten Bantul selama kurun waktu 2013-2017 terlihat cukup terkendali yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil rendah.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul selama kurun waktu antara tahun 2013-2017 dapat dikatakan terkendali. Indikatornya adalah Pertambahan penduduknya yang tidak melebihi dua persen selama periode 2013-2017, oleh karena itu pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan data dari Disdukcapil diketahui antara tahun 2013-2014 justru mencatat penurunan. Penurunan yang terjadi sebesar 0,14 persen dari 914.654 jiwa tahun 2013 menjadi 913.407 jiwa atau berkurang sebanyak 1.247 jiwa. Penurunan jumlah penduduk tersebut dikarenakan adanya proses konsolidasi dan pembersihan data SIAK yang dilakukan oleh Disdukcapil di seluruh Indonesia. Jumlah data penduduk yang berkurang tersebut disebabkan adanya nama ganda dan penduduk yang sudah meninggal di tahun tersebut tetapi masih tercatat.



**Gambar 2.1** Jumlah Penduduk Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2018

Sementara tahun 2015 jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 919.440 jiwa atau bertambah 6.033 (0,66 persen). Demikian juga dengan kondisi jumlah penduduk tahun 2016 kembali meningkat menjadi 928.676 jiwa atau bertambah sebanyak 9.236 jiwa (1,0 persen). Pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,16 persen atau berkurang sebanyak 1.495 jiwa sehingga total penduduk mencapai 927.181 jiwa. Faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah pertambahan penduduk di Kabupaten Bantul tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu penurunan angka kelahiran dan migrasi keluar Bantul yang cukup tinggi. Selain itu, hasil konsolidasi dan pembersihan data yang dilakukan oleh Disdukcapil menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk antara tahun 2013-2014 dan 2016-2017.

## 2.1.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Sementara menurut Mantra (2003), kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk merupakan indikator terjadinya tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Definisi kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km<sup>2</sup>. Menurut BPS (1995), kepadatan penduduk dibagi menjadi tiga jenis yaitu.

- a. Kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

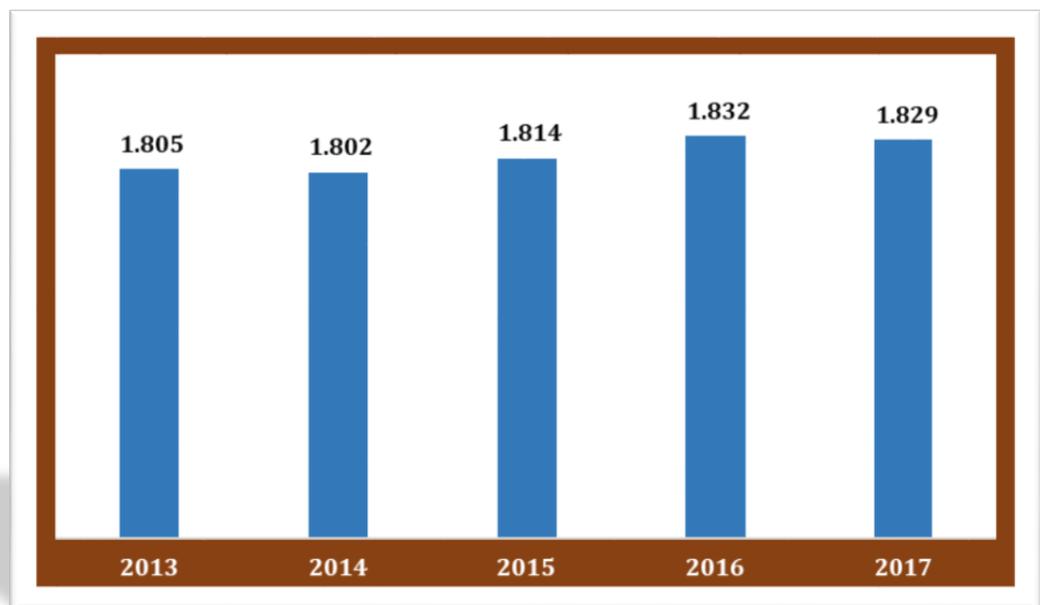
- b. Kepadatan fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah Lahan yang ditanami (*Cultivable Land*).
- c. Kepadatan Agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *Cultivable Land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap 1 (satu) kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk, menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Selain itu, indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

Pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bantul terkonsentrasi di tiga lokasi Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan berdasarkan jumlah penduduknya. Secara posisi, ketiga lokasi tersebut merupakan wilayah penyangga Kota Yogyakarta sehingga mendorong penduduk untuk melakukan migrasi karena keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut menyebabkan Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan menjadi wilayah yang padat penduduknya dan membentuk kota pertumbuhan baru. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami dinamika yang cukup dinamis. Pada periode 2013-2014 kepadatan penduduk turun dari 1.805 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 1.802 jiwa/km<sup>2</sup> atau turun sebesar 0,41 persen. Kepadatan

penduduk tahun 2015 meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk yaitu 1.814 jiwa/km<sup>2</sup> atau naik 0,66 persen dibanding tahun 2014. Pertumbuhan kepadatan penduduk kembali terjadi tahun 2016 menjadi 1.832 jiwa/km<sup>2</sup> atau naik 1 persen dibandingkan kondisi tahun 2015. Kepadatan penduduk kemudian turun pada tahun 2017 sejalan dengan jumlah penduduk yang juga mengalami penurunan. Kepadatan penduduk tahun 2017 sebesar 1.829 jiwa/km<sup>2</sup> atau turun sebesar 0,16 persen dibanding tahun 2016.

Hal ini perlu diwaspadai karena semakin padatnya beberapa wilayah di Kabupaten Bantul akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemajuan antar wilayah. Disamping itu, dengan semakin pesatnya penambahan penduduk akan menyebabkan masalah dukung lingkungan yang juga semakin terbatas. Dampak lain dengan meningkatnya kepadatan penduduk adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.



**Gambar 2.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017**

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2018 (diolah)*

Terjadinya perkembangan fisik wilayah dan persentase penduduk yang tinggal di perkotaan mempengaruhi terjadinya urbanisasi. Pengukuran tingkat urbanisasi perkotaan dilakukan dengan menghitung persentase penduduk perkotaan didasarkan pada perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dengan total penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 diketahui tingkat urbanisasi di Kabupaten Bantul mencapai 83,53 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa penduduk Kabupaten Bantul yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 83,53 persen. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan tersebut cukup besar, bahkan berada pada posisi terbanyak ketiga setelah Kota Yogyakarta sebesar 100 persen dan Kabupaten Sleman yang mencapai 91,32 persen. Terjadinya perkembangan wilayah yang pesat di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadinya perubahan status wilayah pedesaan menjadi perkotaan. Oleh karena itu persentase terbesar penduduknya tinggal di wilayah perkotaan, meskipun ciri pedesaan masih sangat kental yakni penduduk yang masih banyak bekerja di sektor pertanian.

**Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2010**

Kab/Kota	Perkotaan			Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6	7
Kulonprogo	22,1	22,30	22,21	77,88	77,70	77,79
Bantul	<b>83,7</b>	<b>83,37</b>	<b>83,53</b>	<b>16,30</b>	<b>16,63</b>	<b>16,47</b>
Gunungkidul	9,4	9,16	9,28	90,60	90,84	90,72
Sleman	91,5	91,16	91,32	8,53	8,84	8,68
Yogyakarta	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>DIY</b>	<b>36,92</b>	<b>65,98</b>	<b>66,44</b>	<b>33,08</b>	<b>34,02</b>	<b>33,56</b>

Sumber: BPS DIY, Hasil Sensus Penduduk 2010

### 2.1.3 Rasio Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Definisi rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur

dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun) (Subri, 2003). Sementara menurut BPS (dalam <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=95>) *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan sangat penting karena mencerminkan jumlah orang yang secara ekonomi tidak produktif setiap seratus penduduk yang produktif secara ekonomi. Jika informasi mengenai aktivitas ekonomi dari setiap individu tidak tersedia, biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Rasio ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan terhadap usia 65 tahun ke atas.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selain itu, *dependency ratio* juga dapat digunakan sebagai alat ukur perekonomian suatu negara. Dengan kata lain *dependency ratio* juga dijadikan suatu indikator pengukuran tingkat perekonomian suatu negara. Dalam hal ini *dependency ratio* juga mampu menentukan suatu negara tersebut sebagai negara maju atau negara berkembang.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 2.2 diketahui sebesar 41,3. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk kelompok umur 15-64 tahun yang produktif menanggung sekitar 41 orang penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan sebesar 41 persen ini disumbang oleh rasio penduduk muda sebesar 28,3 persen dan rasio penduduk tua sebesar 13 persen. Tahun 2014 angka rasio ketergantungan penduduk Bantul mengalami peningkatan menjadi 44,8 persen. Rasio ketergantungan sebesar 44,8 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda sebesar 30,8 persen dan rasio penduduk tua sebesar 14 persen. Sementara pada 2015 rasio ketergantungan kembali mengalami peningkatan menjadi 44,9 persen yang disumbang oleh rasio penduduk muda sebanyak 31,2 persen dan rasio penduduk tua sebesar 13,7 persen. Rasio ketergantungan pada tahun 2016 stagnan di angka 44,9 persen yang disumbang oleh rasio ketergantungan muda 30,8 persen dan rasio penduduk tua 14,1 persen. Tahun 2017 rasio ketergantungan meningkat menjadi 45,3 persen yang disumbang rasio penduduk muda sebesar 30,8 persen dan rasio penduduk tua mencapai 14,5 persen. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bantul menunjukkan pertumbuhan dari 2013-2017, namun angkanya masih berada dibawah 50. Kondisi ini tentu saja menggembarakan karena dengan rendahnya rasio ketergantungan menunjukkan bahwa beban penduduk produktif yang harus menanggung penduduk non-produktif juga rendah.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kelompok Umur dan Rasio Beban Ketergantungan Tahun 2013-2017**

Tahun	Kelompok Umur						Total		DR	DR Muda	DR Tua
	<14 tahun		15-64 tahun		65+ tahun		Jumlah	%			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%					
2013	183.109	20,0	647.520	70,8	84.025	9,2	914.654	100,0	41,3	28,3	13,0
2014	194.160	21,3	630.916	69,1	88.331	9,7	913.407	100,0	44,8	30,8	14,0
2015	197.912	21,5	634.324	69,0	87.204	9,5	919.440	100,0	44,9	31,2	13,7
2016	197.308	21,2	640.818	69,0	90.550	9,8	928.676	100,0	44,9	30,8	14,1
2017	196.441	21,2	638.072	68,8	92.668	10,0	927.181	100,0	45,3	30,8	14,5

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2018 (diolah)

Gambaran penduduk di Kabupaten Bantul berdasarkan rasio beban ketergantungan ini menunjukkan adanya perkembangan produktivitas sumberdaya manusianya sudah tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan semakin rendah. Dengan demikian maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh usia produktif. Kabupaten Bantul akan menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Hal itu akan terjadi pada kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan 64+) menurun. Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain jika iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Sampai dengan tahun 2030 diharapkan akan terjadi *window of opportunity* tersebut dengan angka ketergantungan mencapai 45-50 persen. Kondisi rasio beban ketergantungan penduduk Bantul sudah mencapai di bawah 50 persen yaitu 45,3 di tahun 2017. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bantul telah menikmati *window of opportunity*.

## 2.1.4 Piramida Penduduk

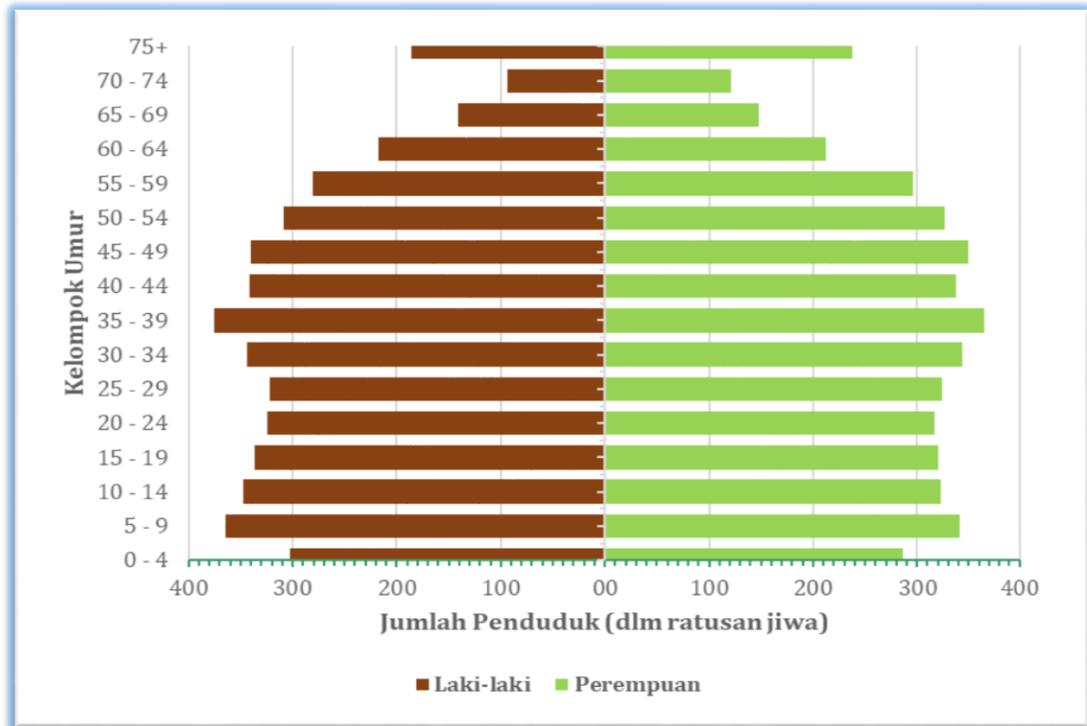
Jumlah penduduk secara paralel berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan individu, keseimbangan dengan lingkungan, dan kekayaan spiritual. Secara realistis hal itu sulit dicapai oleh suatu masyarakat, tanpa menghubungkannya dengan ketiga aspek tersebut. Ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan pola perubahan penduduk di suatu wilayah. Sekalipun pemerintah mampu mengatasi tingginya tingkat fertilitas, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumberdaya alam dan manusia, maka jumlah penduduk yang diinginkan dan memenuhi ketiga aspek tersebut semakin sulit untuk dicapai.

Jumlah penduduk yang besar dapat membawa keuntungan dan masalah yang rumit bagi suatu daerah. Keuntungan yang dapat diambil adalah apabila penduduk yang banyak tersebut mempunyai kualitas yang baik, sehingga dapat diandalkan menjadi pelaku pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi masalah, kalau penduduk tersebut mempunyai kualitas yang rendah dan penyebaran yang tidak merata sehingga menjadi beban pembangunan. Selain jumlah penduduk, komposisi penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat suatu wilayah. Ukuran yang digunakan dalam komposisi penduduk antara lain struktur umur, rasio atau angka ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Ukuran-ukuran tersebut sering digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan program pembangunan, terutama di bidang kependudukan. Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu bangsa atau wilayah. Sebagai contoh, suatu negara atau wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya sebagian besar pada usia produktif (15-64 tahun), atau bentuk piramida penduduknya cembung pada kelompok umur 15-19 tahun sampai kelompok umur 60-64 tahun.

Distribusi umur penduduk pada kenyataannya sering memberikan gambaran tentang riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Di samping itu, juga merefleksikan beban ketergantungan sekelompok usia tertentu terhadap kelompok lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui, terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan kelompok umur penduduk.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah. Dengan melihat piramida penduduk, dapat diketahui struktur penduduk suatu wilayah termasuk dalam struktur penduduk muda, dewasa, atau tua. Dalam menyusun berbagai macam kebijakan bidang kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi, struktur penduduk tersebut menjadi salah satu dasarnya. Pada suatu negara berkembang misalnya, biasanya bentuk piramida penduduknya berbentuk kerucut. Dimana fertilitas dan mortalitasnya tinggi, sehingga proporsi penduduk usia 0-4 tahun sangat tinggi, kemudian secara kontinu mengecil pada kelompok umur di atasnya. Sebaliknya yang terjadi pada negara-negara maju yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih baik, memiliki bentuk piramida hampir menyerupai bentuk tabung atau mulai mengecil pada kelompok umur muda sampai 0-4 tahun. Bentuk ini berarti angka fertilitas dan mortalitasnya sangat kecil, sedangkan penduduk usia kerjanya besar. Dengan demikian tingkat

kesejahteraan penduduknya sangat baik, karena beban ketergantungan penduduknya sangat kecil.



**Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2017**

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2018*

Struktur penduduk Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini ditunjukkan oleh piramida penduduk Kabupaten Bantul yang termasuk dalam penduduk stationer yaitu jumlah penduduk muda rendah dan jumlah penduduk produktinya tinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh bentuk piramida penduduk pada Grafik 2.3, penduduk Kabupaten Bantul tahun 2017 tergolong penduduk usia tua dimana terlihat kecil pada kelompok umur 0-9 tahun dan semakin besar (menggembung) pada kelompok umur di atasnya. Bahkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas proporsinya cukup besar. Permasalahan pada masa mendatang di Kabupaten Bantul adalah semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia. Hal ini harus diantisipasi pemerintah melalui berbagai kebijakan terkait dengan penduduk lanjut usia. Meskipun penduduk Kabupaten

Bantul saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun. Proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul tahun 2017 mencapai 68,8 persen atau 638.072 jiwa. Sedangkan penduduk termasuk dalam kategori lanjut usia (65 tahun keatas) mencapai 92.668 jiwa atau 10 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif jumlahnya sangat besar sehingga Kabupaten Bantul memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatannya.

### **2.1.5 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)**

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda antara kelompok umur satu dengan kelompok umur lainnya. Artinya tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20–24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur 35–39 tahun. Jumlah kelahiran menurut kelompok umur (*age specific fertility rate*) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup pada perempuan kelompok umur tertentu pada suatu periode (tahun) per 1.000 penduduk perempuan usia produktif (15–49 tahun) menurut kelompok umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama.

Angka kelahiran ini sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yang berbeda, sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perencanaan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Indikator ASFR juga akan digunakan untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan sumber perhitungan banyaknya penduduk umur 0-1 tahun dalam perhitungan proyeksi penduduk. Kebijakan pengaturan jumlah kelahiran penduduk dengan keluarga berencana telah dijalankan di DIY termasuk Kabupaten Bantul sudah dimulai sejak awal program KB digulirkan. Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori wilayah Jawa-Bali I yaitu sejak awal program KB

sudah menjalankannya. Program KB sangat Berdampak secara signifikan menurunkan tingkat fertilitas di Kabupaten Bantul. Angka Kelahiran total (*Total Fertility Rate*) adalah banyaknya kelahiran per pasangan usia subur selama masa reproduksinya.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bantul dari tahun 2017-2035 terjadi kecenderungan penurunan angka kelahiran total. Pada tahun 2017, TFR Bantul mencapai 2,02 kemudian turun menjadi 2,01 tahun 2020. Demikian juga tahun 2025 TFR kembali turun menjadi 1,99, tahun 2030 menjadi 1,98, dan tahun 2035 menjadi 1,96. Hasil proyeksi penduduk tersebut akan bisa dipenuhi apabila syarat yang menyertainya juga terpenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah meningkatkan program keluarga berencana dan mendorong pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur.



**Gambar 2.4 TFR Kabupaten Bantul Tahun 2017-2035**

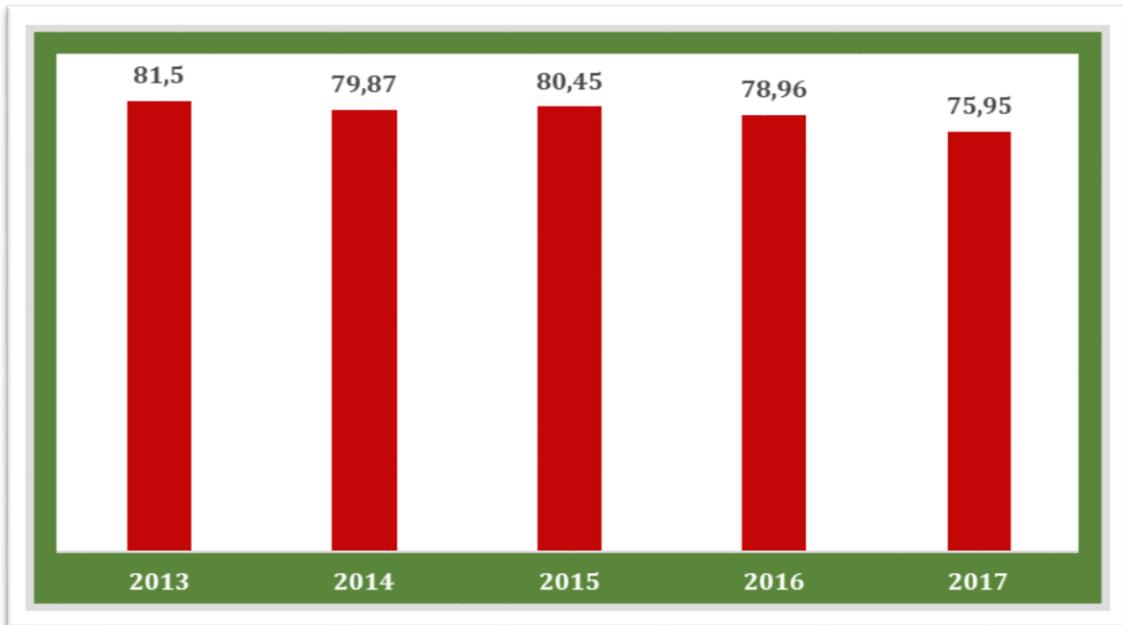
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Bantul 2017-2035, Bappeda Bantul 2018

## 2.1.6 Kesertaan dalam Program Keluarga Berencana

### 2.1.6.1 Tingkat Prevalensi Kontrasepsi

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. Cara menghitung CPR adalah membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikalikan 100. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi (prevalensi kontrasepsi) penting untuk mengukur keberhasilan Program Keluarga Berencana. Prevalensi kontrasepsi didefinisikan sebagai proporsi wanita kawin umur 15-49 tahun pada saat survei memakai salah satu alat/cara KB.

CPR di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 mencapai 8,15 persen dan turun menjadi 79,87 persen di tahun 2014 atau turun sebesar 2,0 persen. Namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan peserta KB aktif menjadi 80,45 persen atau naik sebesar 0,7 persen dibandingkan kondisi tahun 2014. Tahun 2016 CPR sempat mengalami penurunan menjadi 78,96 persen atau turun 1,9 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Sementara pada tahun 2017 CPR kembali mencatat penurunan kembali sebesar 3,8 persen menjadi 75,95 persen. Capaian CPR di tahun 2017 yang telah mencapai 75,95 persen tersebut lebih tinggi dari target nasional, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bantul. Kondisi ini menunjukkan program perencanaan keluarga berencana di Kabupaten Bantul perlu lebih ditingkatkan kembali.



**Gambar 2.5** *Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Tahun 2013– 2017 Kabupaten Bantul*

*Sumber: BKK PP dan KB, 2018*

Melalui KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) program keluarga berencana yang mengatur norma keluarga kecil bahagia sejahtera dapat tertanam di masyarakat. Pasangan usia subur sadar akan arti penting melakukan pengaturan dan pengendalian kelahiran melalui pemakaian alat kontrasepsi. Sebagian besar pasangan usia subur secara sukarela memilih menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Jenis alat kontrasepsi meliputi pil, suntik, implan, IUD, MOW, MOP dan implant.

#### **2.1.6.2 Metode Kontrasepsi**

Pasangan usia subur yang memakai alat kontrasepsi terdiri atas pil, suntik, implan, IUD, MOW, MOP dan implant. Dari berbagai jenis alat kontrasepsi tersebut, yang paling banyak menjadi pilihan pasangan usia subur di Kabupaten Bantul adalah suntik. Hampir 50 persen pasangan usia subur memilih menggunakan suntik untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Perubahan

penggunaan suntik cenderung tetap selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 yang menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik telah mencapai 47 persen atau turun sebesar 15,7 persen dibanding keadaan tahun 2016 yang mencapai 54,4 persen. Meskipun terjadi penurunan pada periode 2016-2017, metode suntik tetap menjadi pilihan utama sebagian PUS di Kabupaten Bantul untuk mencegah dan mengatur kehamilan.



**Gambar 2.6 Persentase Kesertaan PUS dalam ber KB menurut Jenis/Alat Kontrasepsi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017**

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2017 dan 2018

Metode kontrasepsi lainnya selain suntik yang banyak dipilih oleh PUS adalah IUD (*Intra Uterine Device*) atau Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR). Penggunaan IUD di Kabupaten Bantul menunjukkan perubahan yang dinamis antara tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 pengguna IUD mencapai 23,5 persen dan meningkat menjadi 23,4 persen pada tahun 2014 atau turun 0,4 persen. Tahun 2015 pengguna IUD mengalami peningkatan menjadi 23,8 persen atau naik 1,7 persen dan kembali meningkat menjadi 27,8 persen atau naik 16,8 persen di tahun 2016. Di tahun 2017 pengguna IUD mengalami penurunan hingga menjadi 23,9 persen atau turun 14 persen dibanding keadaan tahun 2016. Penggunaan

IUD yang tinggi menjadi sinyal positif dalam konteks pengendalian fertilitas. Hal ini dikarenakan IUD merupakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang tingkat keberhasilannya mendekati 100 persen dan risiko putus pakai yang relatif rendah.

Alat kontrasepsi dapat diperoleh oleh pasangan usia subur sebagai peserta KB aktif dengan mendatangi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan pemerintah yang menyediakan alat kontrasepsi dari mulai posyandu, bidan desa, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah. Sementara pelayanan kesehatan swasta yang menyediakan dan pemasangan alat kontrasepsi meliputi bidan praktik swasta, dokter praktik swasta, klinik, dan rumah sakit swasta. Masyarakat dapat mengakses layanan kontrasepsi dengan mudah, terlebih juga didorong oleh program-program pemerintah seperti bantuan dan pemasangan alat kontrasepsi jenis tertentu secara gratis.

**Tabel 2.3 Distribusi Jenis Kontrasepsi menurut Fasilitas Kesehatan**

Fasilitas Kesehatan	Kondom	Suntik	Pil
Pemerintah	20,0	38,2	55,3
Swasta	80,0	61,8	44,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber: BPS, 2016

Berdasarkan fasilitas kesehatan yang dipilih untuk pemakaian atau pembelian alat kontrasepsi, diketahui untuk kondom paling banyak diperoleh dari fasilitas kesehatan swasta yang mencapai 80 persen. Sisanya 20 persen dari pelayanan kesehatan pemerintah. Demikian juga dengan suntik KB juga paling banyak diperoleh dari pelayanan kesehatan swasta sebesar 61,8 persen dan pemerintah hanya 38,2 persen. Jenis kontrasepsi berupa pil lebih banyak diperoleh pelayanan pemerintah yang mencapai 55,3 persen dan pelayanan swasta sebesar 44,7 persen.

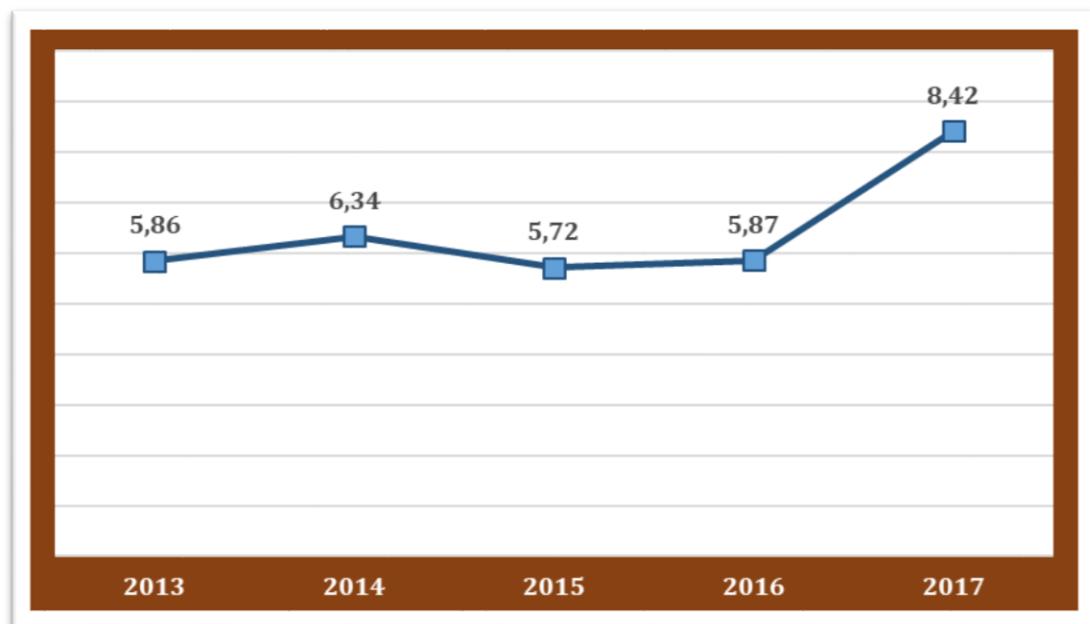
Berdasarkan penyedia layanan kesehatan yang menyediakan alat kontrasepsi di Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa sebagian PUS lebih memilih fasilitas kesehatan swasta. Hal ini bisa saja dipengaruhi semakin berkurangnya penyediaan alat kontrasepsi secara gratis oleh pemerintah pada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Selain itu, bisa juga dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang belum sama antara penyedia layanan pemerintah dengan swasta. Dalam beberapa studi mengenai akses layanan ber KB, seperti yang ditemukan oleh Widyaningrum (2005) yang menyebutkan bahwa mutu layanan jaringan pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan swasta. Sebagian pengguna layanan akhirnya memutuskan untuk menggunakan layanan swasta dalam ber KB dengan pertimbangan kualitas layanan, keramahan petugas, meski dari sisi biaya lebih mahal. Pengguna layanan swasta mengaku merasa aman dan nyaman ketika menggunakan layanan swasta. Indikasi lainnya adalah ketidaksesuaian antara waktu pelayanan pemerintah dengan kebutuhan.

#### **2.1.6.3 *Unmetneed* (Kebutuhan Alat Kontrasepsi yang Tidak Terpenuhi)**

*Unmet need* adalah kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi. *Unmet need* dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari sisi klien. Pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat sebagai klien. Persoalan muncul ketika alat kontrasepsi yang didistribusikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jeda waktu pengusulan dengan realisasi alat kontrasepsi yang cukup panjang menjadi salah satu faktor penyebab perubahan pemilihan alat kontrasepsi. Pertimbangan administrasi pengedropan dan distribusi alat kontrasepsi menjadi persoalan lain kasus *unmet need*. Salah satu indikator keberhasilan program KB, baik dalam tataran Indonesia maupun global adalah terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi (Listyaningsih, dkk., 2016).

Berdasarkan data *Unmetneed* di Kabupaten Bantul diketahui antara tahun 2013-2016 besarnya mencapai sekitar 6 persen. Namun kondisi tersebut berubah

pada tahun 2017, dimana *Unmetneed* telah mencapai 8,42 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena terjadinya peningkatan persentase *Unmetneed* karena hal ini berisiko akan meningkatkan angka fertilitas. Oleh karena itu penting untuk melakukan identifikasi pada kelompok-kelompok mana yang masuk dalam kategori *Unmetneed* baik dari sisi pendidikan dan kelompok umur. Meskipun tidak semua *unmetneed* akan berakhir dengan kelahiran terutama pada kelompok penduduk yang terdidik (Listyaningsih, dkk, 2016).



**Gambar 2.7** Persentase *Unmetneed* di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017  
 Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2018

## 2.2 Kualitas Penduduk

### 2.2.1 Pendidikan

#### 2.2.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*) oleh BPS (2016) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak (BPS, 2015).



**Gambar 2.8 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Bantul dari tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Angka Harapan sekolah 2013-2014 naik sebesar 1,9 persen dari 14,35 menjadi 14,62.

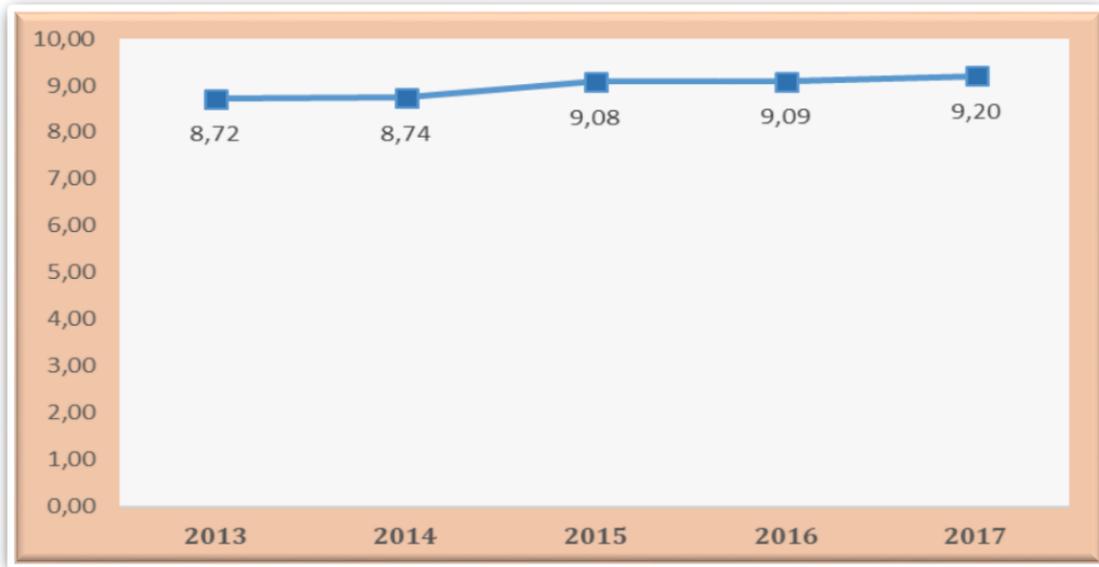
Angka harapan lama sekolah tersebut kembali mencatat kenaikan antara tahun 2014-2015 yaitu dari 14,62 menjadi 14,72 atau naik sebesar 0,68 persen. Pada 2016 tercatat kenaikan dibandingkan kondisi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,07 persen dari 14,72 menjadi 14,73. Sementara tahun 2017 harapan lama sekolah sudah mencapai 14,74 atau naik sebesar 0,07 persen dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 14,73.

### 2.2.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Definisi angka rata-rata lama sekolah (*Means Years of Schooling/MYS*) menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi antara lain yaitu 1) partisipasi sekolah; 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; 3) ijazah tertinggi yang dimiliki; dan 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka rata-rata lama sekolah berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Selain itu, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka *MYS* maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 tercatat 8,72 meningkat menjadi 9,20 di tahun 2017 atau naik 5,5 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,37 persen per tahun. Pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah selalu meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat. Dapat disimpulkan

bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul hanya bersekolah sampai dengan jenjang SMP. Kondisi ini menjadi Tantangan bagi Kabupaten Bantul untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah sampai dengan jenjang SMA.

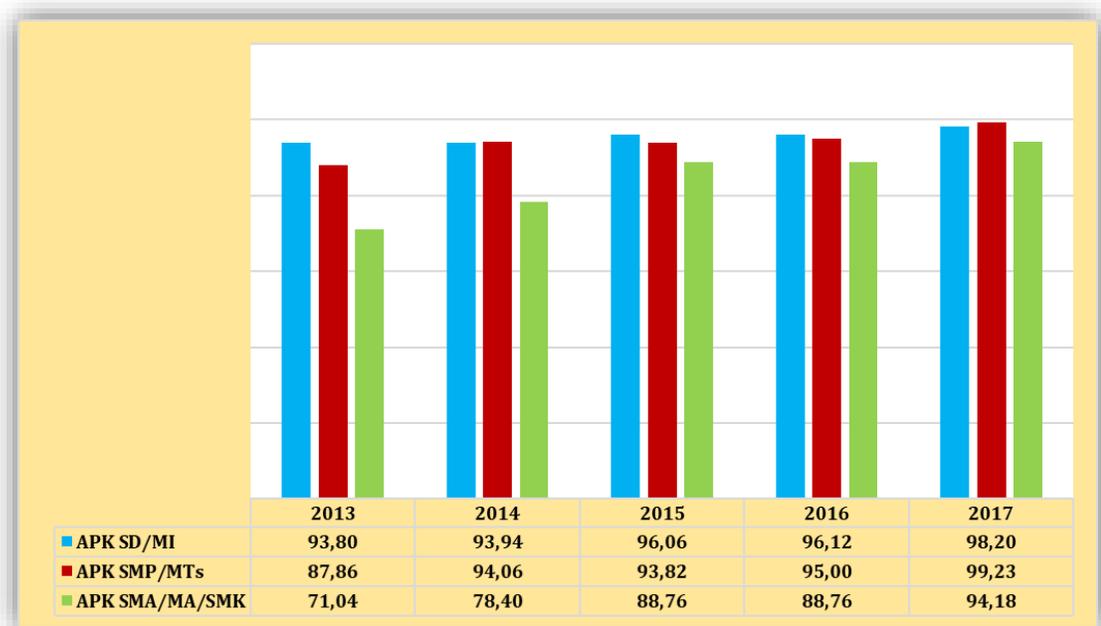


**Gambar 2.9** Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul  
*Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018*

### 2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Terdapat indikator lain yang juga bisa digunakan untuk melihat kondisi pendidikan suatu wilayah yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada

tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.



**Gambar 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013 - 2017 di Kabupaten Bantul**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2018

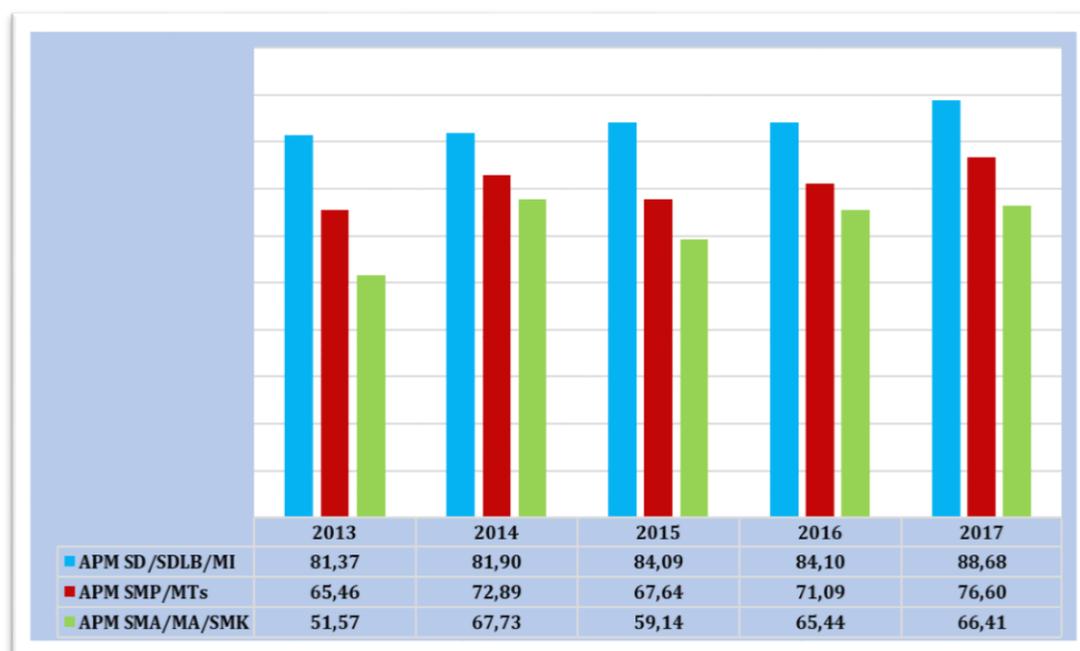
APK penduduk Kabupaten Bantul menunjukkan dinamika yang cukup menarik dari tahun 2013-2017 untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tahun 2013 APK jenjang pendidikan SD mencapai 93,8 meningkat menjadi 98,2 di tahun 2017 atau naik sebesar 4,69 persen dengan rata-rata kenaikan pertahunnya sebesar 1,17 persen. Sementara APK jenjang SMP dan sederajat tahun 2013 sebesar 87,86 naik menjadi 99,23 di tahun 2017 atau naik sebesar 12,94 persen dengan rata-rata kenaikan pertahun mencapai 3,24 persen. Sementara pada pendidikan setingkat SMA mencapai 71,04 di tahun 2013 naik

menjadi 94,18 di tahun 2017 atau naik sebesar 32,57 Persen atau rata-rata pertahun sebesar 8,14 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan APK paling tinggi terjadi pada jenjang SMA sederajat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah APK jenjang SD belum mencapai 100 persen, artinya masih ada anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi saat ini. Demikian juga dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA juga belum mencapai 100 persen, artinya masih ditemukan anak usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang putus sekolah.

#### **2.2.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM)**

Indikator berikutnya dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Apabila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.



**Gambar 2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul**

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2018*

Seperti halnya APK, APM penduduk Kabupaten Bantul juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2013-2017 untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tahun 2013 APM jenjang pendidikan SD mencapai 81,30 meningkat menjadi 88,68 di tahun 2017 atau naik sebesar 8,98 persen dengan rata-rata kenaikan pertahunnya sebesar 2,25 persen. Sementara APM jenjang SMP dan sederajat tahun 2013 dari 65,46 naik menjadi 76,60 di tahun 2017 atau naik sebesar 17,02 persen dengan rata-rata kenaikan pertahun mencapai 4,25 persen. Meskipun sebenarnya APM dari tahun 2014-2015 terjadi penurunan dari 72,89 menjadi 67,64 atau turun 7,2 persen, tetapi dari tahun 2015-2016 terjadi kenaikan sebesar 5,1 persen dan 7,75 persen antara tahun 2016-2017. Kenaikan APM paling tinggi antara tahun 2013-2017 terjadi pada jenjang pendidikan SMA, yaitu naik sebesar 28,78 persen dari 51,57 menjadi 66,41 atau rata-rata tumbuh sebesar 7,19 persen per tahun. Namun sempat mengalami penurunan antara tahun 2014-2015 sebesar 12,68 persen dari 67,73 menjadi 59,14.

Kenaikan APM pada jenjang pendidikan SMA jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan APM di jenjang pendidikan SMP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak siswa SMP yang melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Hal yang sama terjadi pada jenjang SMP dengan kenaikan APM lebih tinggi dibanding SD, sebagai indikasi semakin banyak siswa SD yang melanjutkan ke jenjang SMP.

### 2.2.1.5 Rasio Guru dan Murid

Perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu merupakan angka rasio guru dan murid. Angka ini juga menjadi indikator penting dalam bidang pendidikan. Dimana jika angka rasio tersebut tinggi, maka jumlah guru yang ada tidak sebanding dengan jumlah murid. Hal ini berkaitan erat dengan efektivitas pengajaran karena semakin banyak murid yang diajar sementara jumlah gurunya terbatas akan mengurangi daya serap siswa dalam pelajaran.

**Tabel 2.4 Rasio Guru Murid Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul**

No.	Jenis Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	14.02	14.36	14.78	15.30	15,12
2	SMP/MTs	11.38	12.56	12.44	12.48	12,29
3	SMA/SMK	11.42	11.42	9.00	8.32	-

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2018

Berdasarkan data Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, diketahui rasio guru-murid di Kabupaten Bantul menunjukkan perubahan yang sangat dinamis. Pada jenjang SD, dari tahun 2013-2016 terjadi peningkatan APM dari 14,02 menjadi 15,3 sehingga tingkat pertumbuhannya mencapai 9,13 persen. Akan tetapi antara tahun 2016-2017 terjadi penurunan dari 15,3 menjadi 15,12 atau turun sebesar 1,18 persen. Sementara jenjang SMP terjadi pertumbuhan yang sangat dinamis, dimana antara tahun 2013-2014 terjadi pertumbuhan sebesar 10,37 persen dari

11,38 menjadi 12,56. Periode berikutnya yaitu 2014-2014 terjadi penurunan mencapai 0,96 persen dari 12,56 menjadi 12,44. Selanjutnya terjadi kenaikan antara tahun 2015-2016 sebesar 0,32 persen dari 12,44 menjadi 12,48. Kembali terjadi penurunan APM jenjang SMP antara tahun 2016-2017 sebesar 1,52 persen dari 12,48 menjadi 12,29. Pola yang berbeda ditunjukkan oleh jenjang SMA, dari tahun 2013-2014 angkanya stabil pada 11,42. Berikutnya turun cukup besar yaitu 21,19 persen dari 11,42 menjadi 9,0 dari 2014-2015. Demikian juga terjadi antara tahun 2015-2016 dengan penurunan sebesar 7,56 persen dari 9,0 menjadi 8,32.

Data ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid di Kabupaten Bantul untuk jenjang SD sampai dengan jenjang SMA/ sederajat masih ideal. Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, peserta didik jenjang SD maksimal 32 orang dan SMP maksimal 36 orang. Sedangkan jenjang SMA rasionya sebesar 20. Berdasarkan regulasi dari pemerintah, rasio murid dan guru di Kabupaten Bantul sudah sangat baik. Hal ini berarti rasio guru-murid dari SD-SMA di Kabupaten Bantul tergolong rendah, yang berarti satu orang guru tidak harus melayani banyak murid. Maka daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran lebih baik dan pengajaran menjadi lebih efektif. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah rasio murid dan guru untuk jenjang SMA yang sangat rendah, hal ini menunjukkan guru belum terdistribusi secara merata karena lebih banyak yang ada di sekolah perkotaan dibanding sekolah di Perdesaan. Maka terjadi kelebihan jumlah guru di perkotaan, sementara disisi yang lain sekolah perdesaan mengalami kekurangan guru.

## 2.2.2 Kesehatan

### 2.2.2.1 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Pada 2013 AKI di Kabupaten Bantul mencapai 96,83 per 100.000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 104,7 pada tahun 2014 atau naik sebesar 8,31 persen. Pada tahun 2015 terjadi penurunan AKI menjadi 87,5 per 100.000 kelahiran hidup atau naik turun sebesar 16,43 persen. AKI di Kabupaten Bantul tahun 2015 kembali mencatat kenaikan menjadi 97,65 atau naik sebesar 11,6 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Kembali terjadi penurunan AKI di tahun 2017 menjadi 72,85 sedangkan tahun 2016 sebesar 97,65 atau turun sebesar 25,4 persen.

AKI di Kabupaten Bantul dalam satu tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul. Upaya penurunan AKI dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui keterpaduan lintas program yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulance desa dan donor darah, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia. Partisipasi semua pemangku kepentingan untuk menurunkan AKI dilakukan melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah diintegrasikan dengan kelas ibu, membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), dan peningkatan puskesmas mampu Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency Dasar* (PONED).

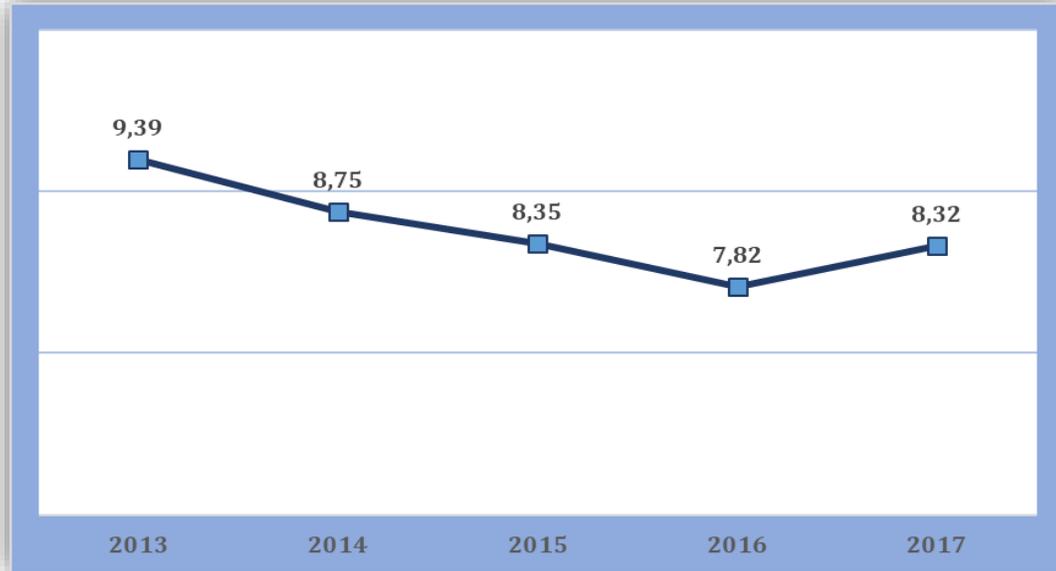


**Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bantul Tahun 2013– 2017**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018*

### 2.2.2.2 Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Bantul, diketahui AKB tahun 2013 mencapai 9,39 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016 AKB di Kabupaten Bantul turun menjadi 7,82 per 1.000 kelahiran hidup atau turun sebesar 16,7 persen atau rata-rata per tahun turun 5,6 persen. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi kenaikan AKB menjadi 8,32 dari sebelumnya 7,82 di tahun 2016, sehingga terjadi kenaikan sebesar 6,4 persen.



**Gambar 2.13 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul**

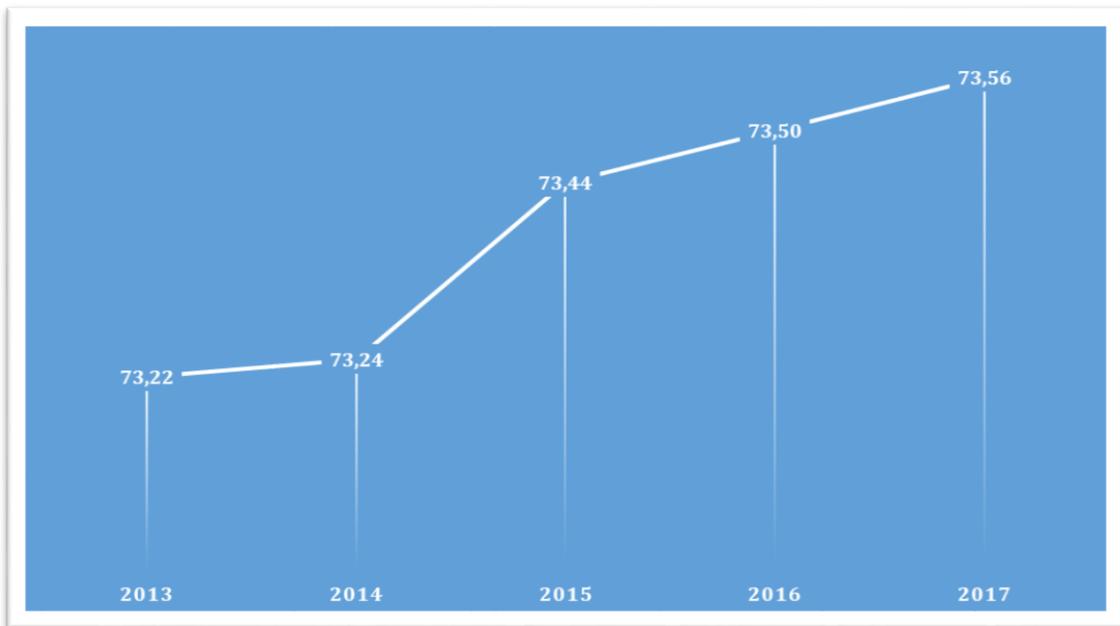
*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018*

Penurunan AKB di Kabupaten Bantul secara umum telah menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan anak. Upaya yang telah dilakukan untuk mempercepat penurunan kematian bayi tersebut melalui keterpaduan lintas program antara lain program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program perbaikan gizi masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur 6 bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI dari keluarga miskin. Namun demikian, perlu diwaspadai terjadinya kenaikan AKB di tahun 2017 sebagai bahan evaluasi program dalam bidang kesehatan. Padahal pada tahun –tahun sebelumnya berhasil menurunkan AKB, tetapi saat ini justru terjadi peningkatan jumlah AKB.

### 2.2.2.3 Angka Harapan Hidup (AHH)

Definsi Angka Harapan Hidup (AHH) menurut BPS adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan

masyarakatnya. Kegunaan angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



**Gambar 2.14** Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. AHH tahun 2013 mencapai 73,22 kemudian meningkat menjadi 73,24 tahun 2014 atau naik sebesar 0,03 persen. Pada 2015, AHH Bantul kembali mencatat kenaikan yakni menjadi 73,44 atau naik sebesar 0,27 persen dibanding tahun 2014. Demikian juga tahun 2016 kembali terjadi peningkatan AHH sebesar 0,08 persen dari 73,44 tahun 2015 menjadi 73,50 di tahun 2016. Pada 2017 AHH telah mencapai 73,56 atau naik sebesar 0,08 persen

dibanding tahun 2016. Kenaikan AHH Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2013-2017 sebesar 0,46 persen dengan rata kenaikan pertahunnya mencapai 0,12 persen.

Secara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) yang menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan kesehatan bagi kelompok usia lanjut. Lembaga ini merupakan lembaga yang aktif dalam melakukan upaya-upaya promotif, preventif dan juga kuratif di bidang kesehatan lansia. Dengan dukungan dari berbagai *stakeholder* maka umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.

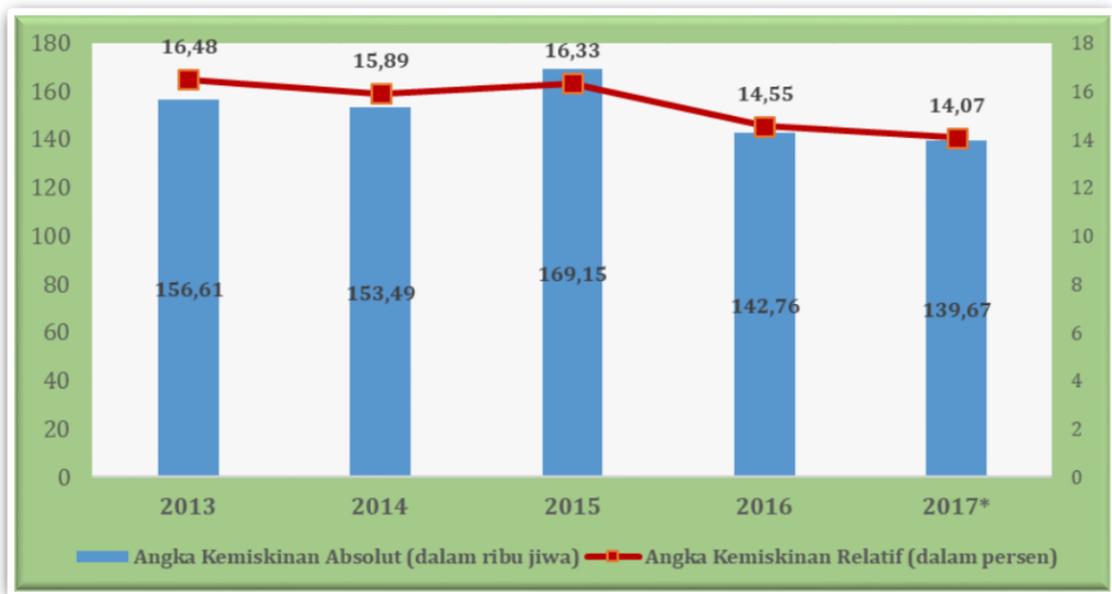
## **2.2.3 Kemiskinan**

### **2.2.3.1 Angka Kemiskinan Absolut dan Relatif**

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula  $(100 - \text{angka kemiskinan})$ . Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Angka kemiskinan dapat dibagi menjadi jenis, yaitu angka kemiskinan relatif (dinyatakan dalam persen) dan angka kemiskinan absolut (dinyatakan

dalam jiwa). Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami dinamika yang menarik. Dari data BPS terlihat angka kemiskinan absolut di Kabupaten Bantul tahun 2013 mencapai 156,61 ribu jiwa atau 16,48 persen dan berkurang menjadi 153,49 ribu jiwa (15,89 persen) di tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan absolut dari 2013-2014 sebesar 1,99 persen, demikian juga dengan angka kemiskinan relatif yang juga mencatat penurunan sebesar 3,58 persen. Akan tetapi angka kemiskinan absolut dan relatif di tahun 2015 justru mengalami peningkatan, dimana angka kemiskinan absolut menjadi 169,15 ribu jiwa atau naik 10,2 persen dibanding tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada angka kemiskinan relatif, tercatat besarnya peningkatan sebesar 2,77 persen dari tahun 2014.



**Gambar 2.15** Angka Kemiskinan Absolut dan Angka Kemiskinan Relatif di Kabupaten Bantul Tahun 2013- 2017

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Ket: \* Angka sementara

Dalam dua tahun terakhir yaitu 2016-2017 angka kemiskinan Kabupaten Bantul terjadi penurunan. Dari tahun 2015-2016, angka kemiskinan absolut turun sebesar 15,6 persen dan angka kemiskinan relatif turun 10,9 persen. Kondisi yang

sama terjadi pada tahun 2017 yang juga mencatat penurunan angka kemiskinan absolut sebesar 2,16 persen dan angka kemiskinan relatif turun 3,3 persen. Terjadinya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, khususnya tahun 2015 sampai dengan 2017 menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai di tingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, serta validasi data keluarga miskin. Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari Pemerintah DIY juga memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan tersebut.

### **2.2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM dapat digunakan sebagai ukuran posisi pembangunan manusia dan penentuan kebijakan. Indeks ini memberikan gambaran informasi melalui perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*) dalam mengakses hasil pembangunan. Titik berat pembangunan daerah adalah upaya untuk memberdayakan penduduk sehingga memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan salah satu indikator yaitu indikator pembangunan manusia dengan melihat perkembangan IPM.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



**Gambar 2.16 Perkembangan IPM Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul**

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Ket:\*\* Angka sangat sementara

Selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM tahun 2013 sebesar 76,78 kemudian

meningkat menjadi 77,11 di tahun 2014 atau naik sebesar 0,43 persen. Pada tahun 2015, IPM Bantul kembali mencatat kenaikan yakni menjadi 77,99 atau naik sebesar 1,14 persen dibanding tahun 2014. Demikian juga tahun 2016 kembali terjadi peningkatan IPM sebesar 0,55 persen dari 77,99 tahun 2015 menjadi 78,42 di tahun 2016. Demikian juga yang terjadi pada 2017, kembali tercatat kenaikan IPM sebesar 0,32 persen dari 78,42 di tahun 2016 menjadi 78,67. Kenaikan IPM Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 2,46 persen dengan rata-rata kenaikan pertahunnya mencapai 0,62 persen.

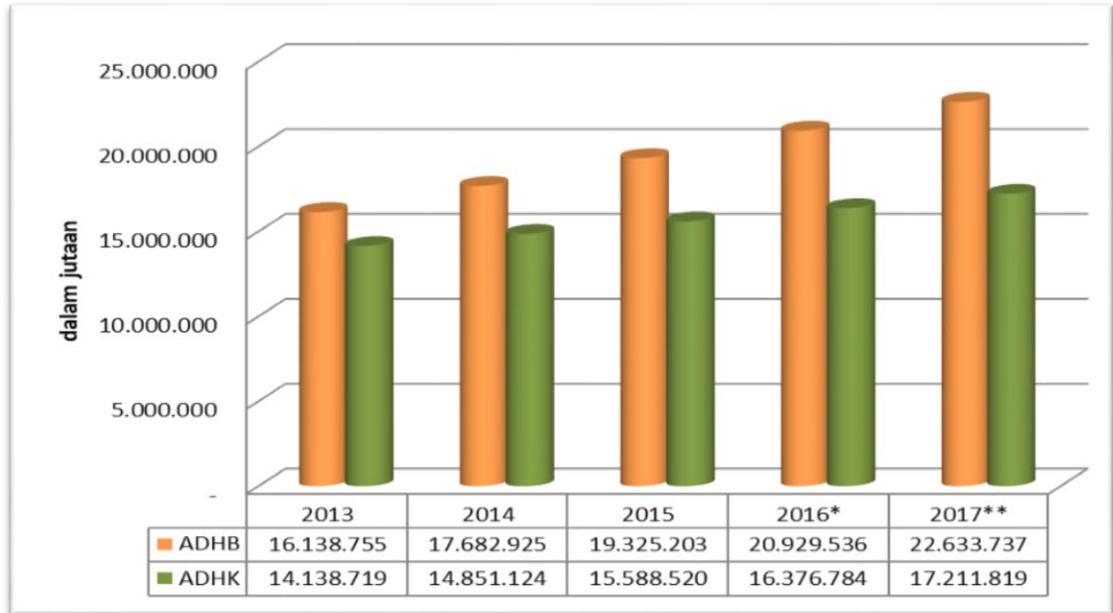
Berdasarkan kategori pengelompokan nilai IPM, IPM Kabupaten Bantul tahun 2017 berada pada kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Meskipun capaiannya terus meningkat, tetapi nilai IPM Kabupaten Bantul selama tujuh tahun terakhir belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi sangat tinggi ( $\text{IPM} \geq 80$ ). Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun-tahun mendatang mampu memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul belum mempunyai IPM yang menembus kategori sangat tinggi karena bisa disebabkan peningkatan komponen-komponennya yang belum optimal. Lambatnya peningkatan komponen IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM.

## **2.2.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bantul**

### **2.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB dihitung

dengan metode yang sama sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.



**Gambar 2.17 Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (jutaan rupiah)**

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Ket. : \* Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

PRDB dibedakan menjadi dua yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menurut ADHB dari tahun 2013-2017 mencatat pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 40,24 persen dari 16,13 trilyun di tahun 2013 menjadi 22,63 trilyun tahun 2017. Kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 40,24 atau rata-rata 10,06 persen per tahun. PDRB Kabupaten Bantul menurut ADHB pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 22,63 trilyun meningkat sebesar 8,19 persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp 20,92 trilyun. Demikian juga dengan PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencatat pertumbuhan positif selama tahun 2013-2017. Selama kurun

waktu 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mengalami fluktuatif walalupun masih mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mengalami perlambatan mencapai 4,97 dan terus meningkat hingga mencapai 5,10 pada tahun 2017.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di Kabupaten Bantul didukung oleh kinerja pada kategori industri pengolahan, penyediaan akomodasi makan minum, dan informasi komunikasi. Ketiag kategori tersebut pada tahun 2017 mengalami laju pertumbuhan diatas pertumbuhan secara total dengan *share* (pembagian) yang cukup besar dalam menyumbang PDRB.

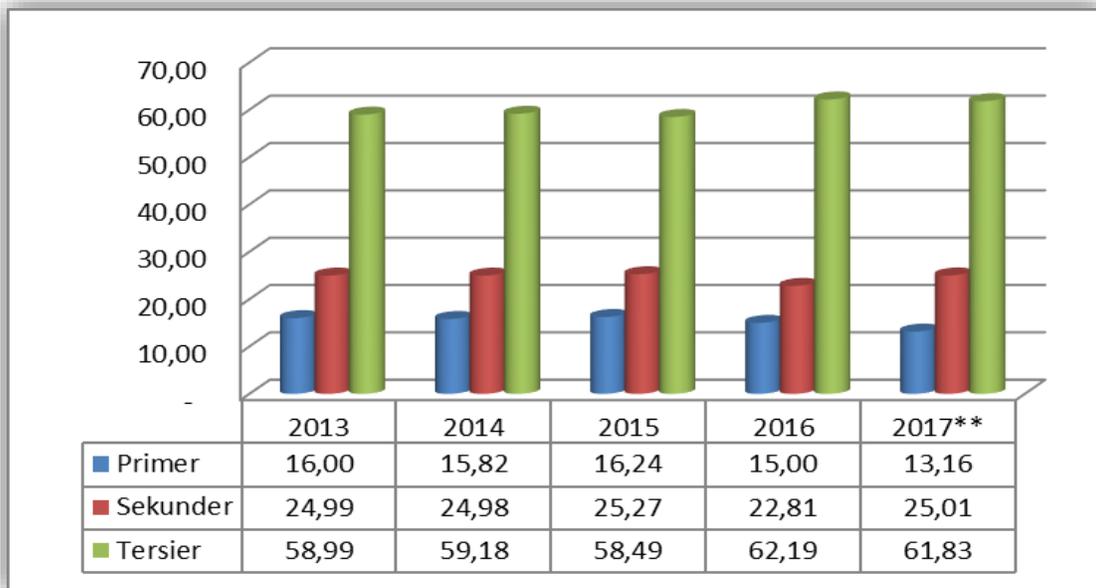
#### **2.2.4.2 Kontribusi Sektoral**

Lapangan usaha yang turut menyumbang perekonomian di Kabupaten Bantul terbagi atas tiga jenis yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Dari ketiga sektor tersebut masing-masing terdiri atas lapangan usaha berikut ini.

1. Sektor primer terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalian.
2. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi.
3. Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) real estate; (7) jasa perusahaan; (8)

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (11) jasa lainnya.

Kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan dari tahun 2013-2017. Dalam lima tahun terakhir, peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor tersier dan sekunder. Di tahun 2017, kontribusi terbesar adalah sektor tersier yang mencapai 61,83 persen, disusul sektor sekunder sebesar 25,01 persen, dan sektor primer hanya sebesar 13,16 persen. Semakin mengecilnya peran sektor primer dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Bantul dapat diamati dari perubahan yang terjadi antara tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 sektor primer masih berkontribusi sebesar 16 persen, tetapi pada tahun 2017 berkurang menjadi 13,16 persen atau turun 17,75 persen atau rata-rata turun 4,44 persen per tahun.



**Gambar 2.18 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2013 - 2017 di Kabupaten Bantul**

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Ket.: \*\*Angka sangat sementara

Sementara sektor sekunder mencatat perkembangan yang dinamis karena kontribusinya berfluktuasi. Kontribusi sektor sekunder melambat lebih rendah antara tahun 2013-2014 dari 24,99 persen menjadi 24,98 persen. Selanjutnya antara tahun 2014-2015 sektor sekunder mencatat pertumbuhan dari 24,98 persen menjadi 25,27 persen atau naik 1,16 persen. Namun pada tahun 2015-2016 sektor sekunder kembali mengalami penurunan yaitu mencapai 9,73 persen dari 25,27 persen menjadi 22,81 persen. Pada rentang waktu 2016-2017 sektor sekunder tumbuh positif sebesar 9,64 persen dari 22,81 persen menjadi 25,01 persen.

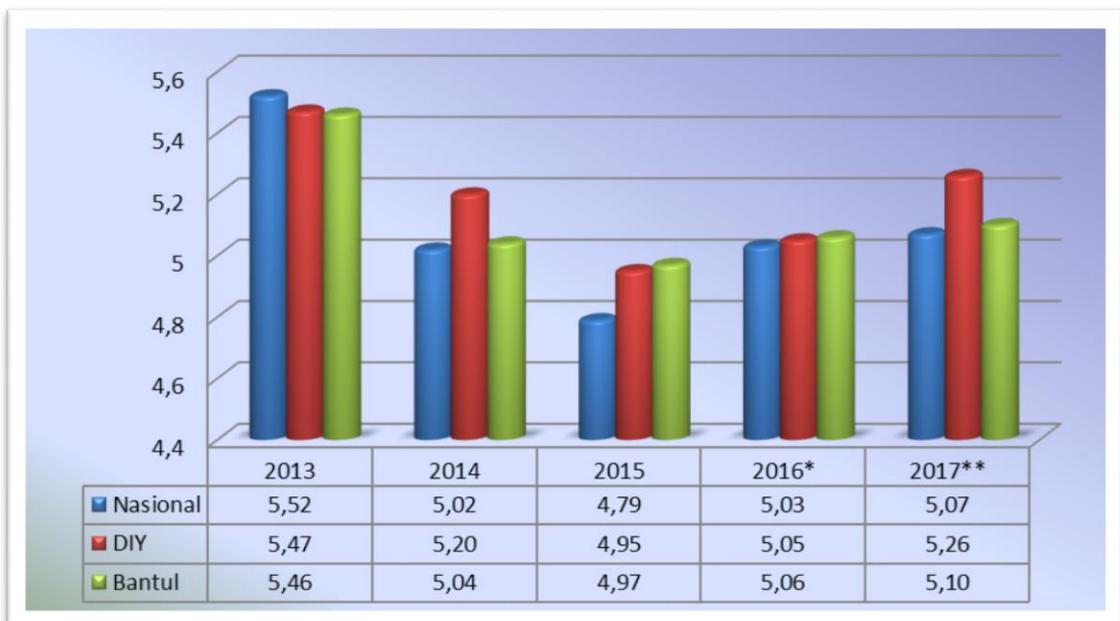
Dinamika yang terjadi pada sektor tersier hampir sama dengan sektor sekunder, yaitu terjadinya perubahan setiap tahunnya. Diketahui antara tahun 2013-2014 sektor tersier tumbuh positif sebesar 0,32 persen, namun mengalami perlambatan di tahun 2014-2015 (1,17 persen) tetapi kemudian kembali melaju di tahun 2015-2016 (6,33 persen), dan antara tahun 2016-2017 kembali melambat (0,58 persen). Dinamika yang terjadi antara sektor tersier dan sekunder tersebut tidak menjadikan transformasi ekonomi secara sektoral. Artinya kontribusi terbesar masih diberikan oleh sektor tersier, sedangkan sektor primer mulai ditinggalkan.

#### **2.2.4.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari perhitungan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul menunjukkan perlambatan selama periode 2013-2017. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan mencapai 5,46 persen dan terus mengalami perlambatan mencapai 5,10 pada tahun 2017. Bahkan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Bantul hanya mencapai 4,97 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dalam dua tahun terakhir disumbang oleh industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang lebih baik.

Industri di Kabupaten Bantul didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah dan industri skala kecil tersebut terkonsentrasi di lokasi tertentu. Sentra industri yang menghasilkan produk-produk tradisional seperti gerabah/keramik, batik, keris, atau wayang berorientasi pada ekspor dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,26 persen, tetapi sedikit diatas angka nasional yang mencapai 5,07 persen.



**Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul**

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

Ket. : \* Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

#### 2.2.4.4 Laju Inflasi

Definisi inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus. Selain terjadi secara terus menerus, kenaikan harga bisa disebut dengan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang (Latumaerissa, 2011:22). Pendapat lain disampaikan oleh Mankiw et.al (2012:155) inflasi diartikan sebagai kenaikan tingkat harga secara keseluruhan.

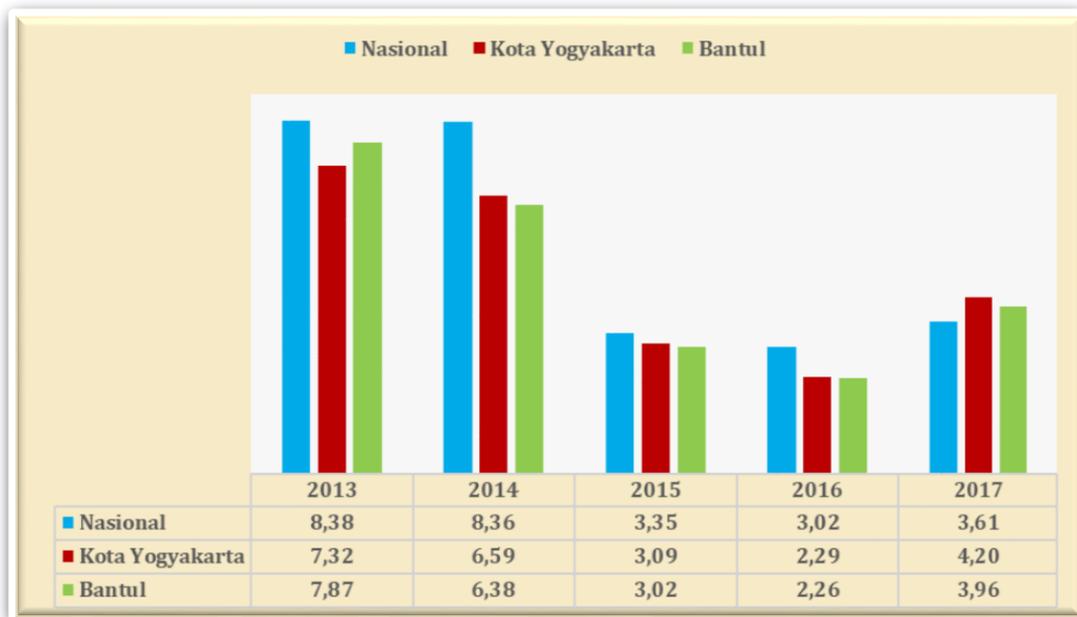
Inflasi tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara. Beberapa sebab yang dapat menimbulkan inflasi antara lain pemerintah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku berbagai golongan dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktifitas mereka, adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluarnya yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan, adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi yang mendorong kenaikan harga, pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga, pengaruh inflasi luar negeri, khususnya bila negara yang bersangkutan mempunyai sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor (Waluyo, 2009).

Terdapat beberapa macam inflasi yang dapat terjadi dalam perekonomian, baik berdasarkan parah atau tidaknya suatu inflasi dan didasarkan pada sebab-sebab awal terjadinya inflasi. Menurut Latumaerissa (2011: 23) inflasi dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan jika didasarkan atas parah tidaknya suatu inflasi, sebagai berikut.

- a. Inflasi ringan (di bawah 10 persen setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10 persen-30 persen setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30 persen-100 persen setahun)
- d. Hiperinflasi (di atas 100 persen setahun)

Laju inflasi Kabupaten Bantul dari tahun 2013-2017 cukup dinamis. Tahun 2013 inflasi diketahui sebesar 7,87 dan menurun menjadi 6,38 di tahun 2014 atau turun sebesar 18,93 persen. Tahun 2015 kembali terjadi penurunan laju inflasi yang sangat tinggi yaitu menjadi 3,02 atau turun 52,66 persen dibanding kondisi tahun 2014. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan inflasi di Kabupaten Bantul menjadi 2,26 atau turun 25,17 persen dibanding tahun 2015. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2017, inflasi kembali meningkat menjadi 3,96 atau naik sangat tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 75,22 persen. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 berada diatas angka nasional yaitu 3,61 tetapi masih dibawah inflasi yang terjadi di DIY sebesar 4,2.

Angka inflasi Kabupaten Bantul antara tahun 2013-2017 masih tergolong dalam inflasi ringan karena nilainya dibawah 10 persen setahunnya. Secara umum laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan, diikuti kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sedangkan laju inflasi terendah terjadi pada kelompok sandang. Meskipun kondisi perekonomian menunjukkan terjadinya beberapa peristiwa yang dapat mempengaruhi stabilitas inflasi daerah yaitu kondisi alam dan musim yang kurang mendukung peningkatan produksi komoditas pangan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pertengahan tahun 2015, peningkatan tarif dasar listrik, dan kenaikan harga LPG, sehingga memberikan dampak terhadap kenaikan harga khususnya pada komoditas kebutuhan pokok, yaitu bahan makanan dan bahan pangan sebagai penyumbang inflasi terbesar, namun hal tersebut masih relatif wajar. Melalui upaya-upaya pengendalian dalam bentuk koordinasi lintas sektoral secara intensif, pemantauan dan operasi pasar, optimalisasi penyediaan dan kelancaran distribusi komoditas pokok masyarakat serta penguatan kelembagaan dan informasi, Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil menjaga kestabilan inflasi daerah.



**Gambar 2.20 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2013-2017**

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018

#### 2.2.4.5 Koefisien Gini

Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan (Todaro, 2006).

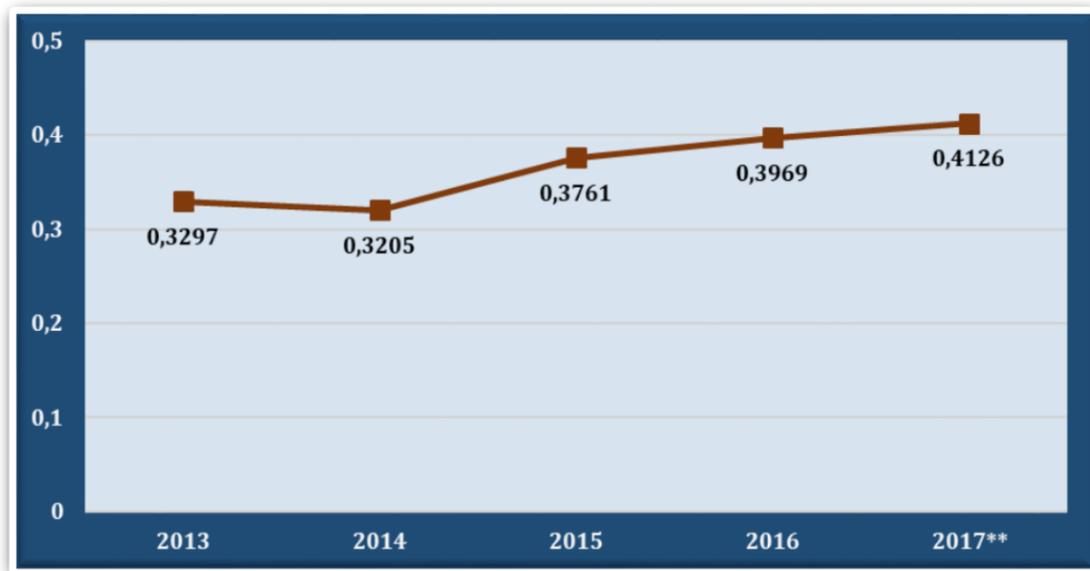
Koefisien Gini adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-beda dari nol yang mengindikasikan suatu pemerataan sempurna (*perfect equality*) sampai satu yang berarti suatu ketimpangan total (*perfect inequality*)

dalam distribusi pendapatan dan pengeluaran. Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut.

1. Kriteria koefisien gini kategori berat jika nilainya lebih dari 0,5
2. Kriteria koefisien gini kategori sedang jika nilainya antara 0,35-0,5
3. Kriteria koefisien gini kategori ringan jika nilainya kurang dari 0,35

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2013 mencapai sebesar 0,3297 dan turun menjadi 0,3205 pada tahun 2014, sehingga penurunannya sebesar 2,79 persen. Kondisi tersebut berubah di tahun 2015, dimana terjadi peningkatan Koefisien Gini cukup tinggi di Kabupaten Bantul menjadi 0,3761 atau naik sebesar 17,35 persen dibanding tahun 2014. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2016 menjadi 0,3969 atau naik 5,53 persen dibanding tahun 2016 dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi 0,4126 atau naik sebesar 3,96 persen dibanding kondisi tahun 2016.

Capaian Koefisien Gini pada tahun 2017 merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil dibandingkan pada tahun 2016 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah Koefisien Gini di Kabupaten Bantul mulai tahun 2015-2017 memiliki nilai sudah diatas 0,35 sehingga dikategorikan ketimpangan pendapatan dalam skala sedang.



**Gambar 2.21 Koefisien Gini di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

#### 2.2.4.6 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. Maka jumlah penduduk akan sangat akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2013-2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 nilai PDRB perkapita naik sebesar 8,2 persen dibanding tahun 2013 dan kembali meningkat 7,9 persen di tahun 2015. PDRB perkapita kembali meningkat sebesar 7 persen di tahun 2016 dan 7,2 persen di tahun 2017. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bantul antara 2013-2017 secara rata-rata tumbuh sebesar 7,6 persen dari Rp17.040.684,- menjadi Rp22.741.440,-.



**Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2013 - 2017**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

\*\* Angka sangat sementara

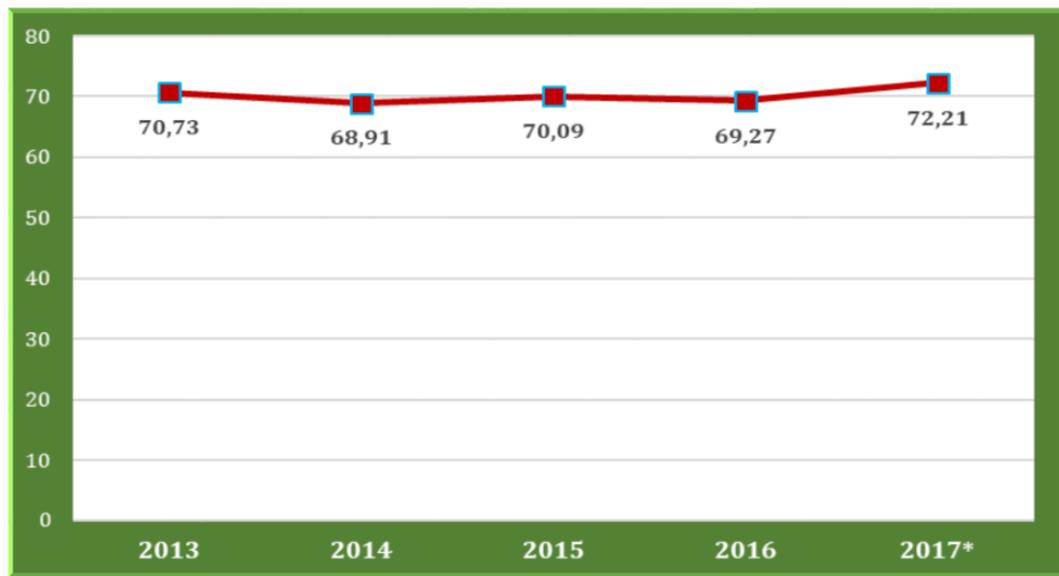
#### 2.2.4.7 Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul memperlihatkan

pertumbuhan yang sangat dinamis. Pada tahun 2013 TPAK mencapai 70,73 persen dan turun menjadi 68,91 persen pada tahun 2014 atau turun sebesar 2,6 persen. Kondisi tersebut berubah di tahun 2015, dimana terjadi peningkatan TPAK di Kabupaten Bantul menjadi 70,09 persen atau naik 1,7 persen dibanding tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 69,27 persen atau turun 1,2 persen dibanding tahun 2015 dan tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 72,21 persen atau naik sebesar 4,2 persen dibanding kondisi tahun 2016. Selama kurun waktu 2013-2017 telah terjadi peningkatan TPAK di Kabupaten Bantul sebesar 2,1 persen atau rata-rata pertahunnya naik sebesar 0,5 persen dari 70,73 persen (tahun 2013) menjadi 72,21 persen (tahun 2017). Pada periode tersebut, TPAK sebenarnya tidak selalu meningkat dari tahun ke tahun karena terjadinya dinamika.

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan memiliki efek yang berat untuk ditanggung. Sebagian besar orang yang kehilangan pekerjaan akan menurunkan standar kehidupannya dan tekanan psikologis. Maka, isu pengangguran menjadi topik bahan diskusi bahkan perdebatan politik (Mankiw, 2006) Pengangguran (*unemployment*) pada kenyataannya dihadapi oleh semua negara, baik negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) maupun negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001). Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2000).

Definisi pengangguran terbuka menurut BPS adalah istilah untuk orang dengan kondisi a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Penanganan pengangguran terbuka (*open unemployment*) merupakan masalah yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah.



**Gambar 2.23 Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017**  
*Sumber: Dinas Nakertrans Kabupaten Bantul (2013- 2016), BPS Kabupaten Bantul, 2018*

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bantul memperlihatkan dinamika yang menarik dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 TPT mencapai 3,36 persen dan turun drastis menjadi 2,57 persen pada tahun 2014 atau turun sebesar 23,51 persen. Kondisi tersebut berubah di tahun 2015, dimana TPT di Kabupaten Bantul meningkat menjadi 3,0 persen atau naik sebesar 16,73 persen dibanding tahun 2014. Data tahun 2016 tidak tersedia karena adanya program penghematan anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan Sakernas untuk

penyajian data tingkat kabupaten. Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 3,12 atau naik sebesar 4,0 persen dibanding kondisi tahun 2015. Selama kurun waktu 2013-2017, meskipun terjadi dinamika pertumbuhan TPT di Kabupaten Bantul, tetapi secara umum terjadi penurunan sebesar 7,14 persen dalam periode tersebut.

Pada Tahun 2017, angka pengangguran di Kabupaten Bantul mencapai 3,12 persen. Angka tersebut diharapkan akan turun menjadi 2,8 persen di tahun 2021 sebagai target akhir periode RPJMD (Tahun 2016-2021). Meskipun menunjukkan penurunan, namun Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berupaya untuk menekan TPT dengan berbagai langkah. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran ini diantaranya melalui program kerjasama penempatan tenaga kerja, peningkatan kapasitas SDM, inkubasi bisnis, uji coba wirausaha, subsidi program, padat karya produktif dan infrastruktur serta perluasan lapangan kerja.

**Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul**

No	Tahun	Jumlah Pengangguran Absolut	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	2013	16.438	3,36
2	2014	12.872	2,57
3	2015	15.309	3,00
4	2016*	*	*
5	2017	17.466	3,12

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

\* Tahun 2016 tidak tersedia data (tidak dilaksanakan Sakernas bulan Agustus 2016)

## 2.3 Pembangunan Keluarga

Keluarga memiliki beberapa peran penting baik dilihat dari fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu.

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Dampak dari tidak berfungsinya keluarga secara optimal adalah munculnya beberapa permasalahan dari sisi internal maupun eksternal keluarga.

## 2.4 Migrasi Penduduk

Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor yang dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, selain kelahiran dan kematian. Analisis migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya desentralisasi (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, adanya desentralisasi dalam pembangunan, di lain pihak, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar (Munir, 2000). Definisi Migrasi atau gerak

penduduk dalam demografi adalah *population mobility* atau secara lebih khusus *territorial mobility* yang biasanya mengandung makna gerak spasial, fisik dan geografis (Shryllock dan Siegel, 1973 dalam Rusli, 1996). Gerak penduduk mengandung dimensi gerak penduduk permanen maupun dimensi non-permanen. Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk permanen, sedangkan dimensi gerak penduduk non-permanen terdiri dari sirkulasi dan komunikasi (Rusli, 1996).

Definisi lain migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara (Munir, 2000). Ada beberapa jenis migrasi yaitu.

1. Migrasi masuk (*In Migration*) yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (*area of destination*).
2. Migrasi Keluar (*Out Migration*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (*area of origin*).
3. Migrasi Bersih (*Net Migration*) yaitu selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi yang masuk lebih besar dari pada migrasi keluar, maka disebut migrasi bersih positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar dari pada migrasi masuk disebut migrasi bersih negatif.
4. Migrasi Semasa/Seumur Hidup (*Life Time Migration*) adalah mereka yang pada waktu pencacahan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya tanpa melihat kapan pindahnya.
5. Urbanisasi (*Urbanization*) yaitu bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk

ke kota dan/atau akibat dari perluasan daerah kota dan pertumbuhan alami penduduk kota.

6. Transmigrasi (*Transmigration*) adalah pemindahan dan/kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

**Tabel 2.6 Perkembangan Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul**

Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Bersih
2013	9.506	6.976	2.530
2014	10.318	7.334	2.984
2015	11.538	8.081	3.457
2016	10.535	8.909	1.626
2017	11.544	7.865	3.679

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2018*

Migrasi masuk yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam periode 2013-2017 jumlahnya selalu lebih besar dibanding dengan migrasi keluar. Dalam kurun waktu tersebut rata-rata migrasi bersih tercatat sebesar 2.855 jiwa. Perkembangan migrasi bersih di Kabupaten Bantul selalu positif, namun antara tahun 2015 sampai dengan 2016 terjadi penurunan. Pada tahun 2015 migrasi tercatat sebesar 3.457 jiwa kemudian turun menjadi 1.679 jiwa di tahun 2016 atau turun sebesar 53 persen. Tahun 2016 terlihat jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar Kabupaten Bantul jumlahnya paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun lainnya yaitu 8.909 jiwa. Migrasi bersih yang terjadi di Kabupaten Bantul berdampak terhadap penambahan jumlah penduduk secara alami. Namun demikian, penambahan jumlah penduduk sebagai hasil migrasi tersebut termasuk rendah karena dalam satu tahun hanya bertambah rata-rata 2.855 jiwa.

## 2.5 Data dan Informasi Kependudukan

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

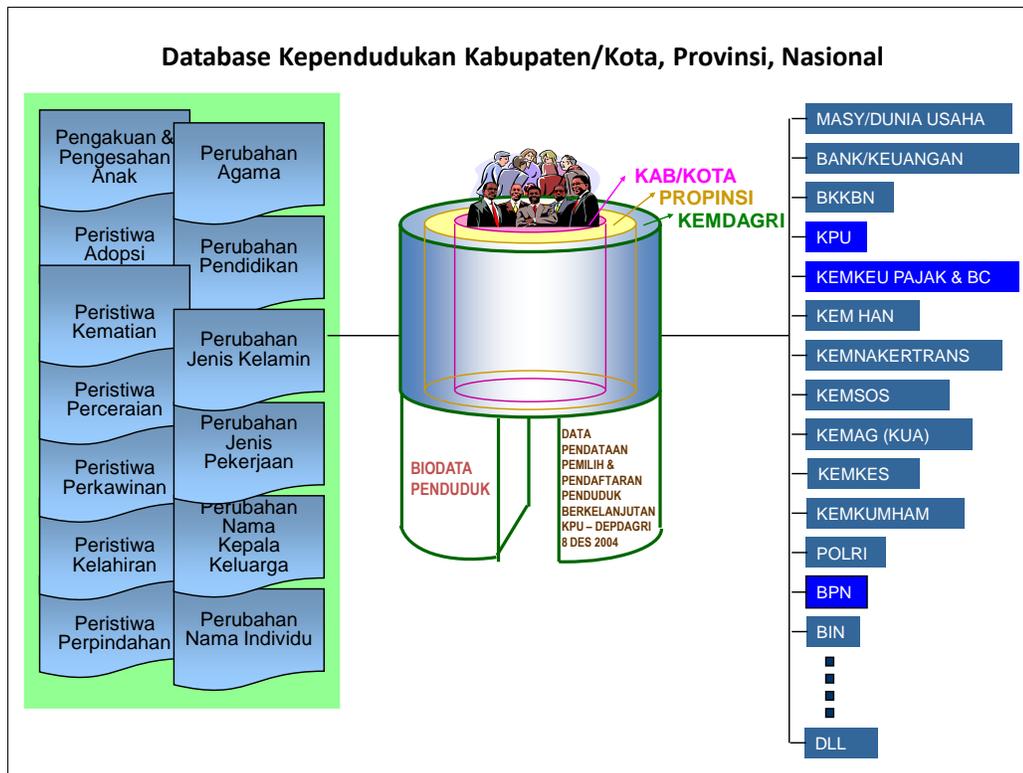
Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber. *Pertama*, sensus penduduk dengan informasi yang dikumpulkan bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. *Kedua*, survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Misalnya SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) yang dilaksanakan 10 tahun sekali, Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan yang dikumpulkan dua kali dalam setahun. Selain itu, ada juga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), SDKI, Survei Pertanian, Survei Kesejahteraan dan lainnya.

Ketiga, registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW, dan dusun. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan

perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk. Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk. Pertama, dari sisi cakupan, registrasi penduduk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa/kelurahan. Hal ini memungkinkan penggunaan hasil registrasi penduduk untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Kedua, registrasi penduduk dilaksanakan secara kontinu, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu.

Sebagai sumber data yang ideal, registrasi penduduk sampai dengan saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalahnya adalah kualitas data yang rendah. Sumber masalah tersebut diantaranya adalah penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kejadian demografis, menyebabkan data yang terkumpul *underreporting*.

Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



**Gambar 2.24 Data Dasar (*Database*) Kependudukan di Indonesia**

*Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2013*

Untuk membangun data dasar (*database*) kependudukan, saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kerangka administrasi kependudukan, yang terdiri dari hal-hal berikut.

1. Sistem Pendaftaran Penduduk (Dafduk), meliputi.

- pencatatan biodata penduduk per keluarga
- pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
- pendataan penduduk rentan kependudukan
- pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

2. Sistem Pencatatan Sipil (Capil), meliputi.

- pencatatan kelahiran

- pencatatan lahir mati
- pencatatan perkawinan
- pencatatan pembatalan perkawinan
- pencatatan perceraian
- pencatatan pembatalan perceraian
- pencatatan kematian
- pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak
- pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
- pencatatan peristiwa penting
- pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

Hasil yang telah dicapai tahun 2010 adalah pemutakhiran data dasar (*database*) kependudukan di semua kabupaten dan kota serta penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) di 329 kabupaten dan kota. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

# Bab

# 3

## Kondisi Kependudukan yang Diinginkan

### 3.1 Kuantitas Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul selama kurun waktu antara tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang cukup terkendali. Jumlah penduduk Bantul berdasarkan Data SIAK tahun 2017 sebanyak 927.181 jiwa dan diharapkan pada tahun 2035 mencapai 1.075.635 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,8 persen rata-rata pertahunnya. Perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Bantul 2017-2035 dilakukan dengan menggunakan *Software Spectrum3*. Data dasar yang digunakan dalam proyeksi tersebut adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dari Disdukcapil tahun 2017 (Data SIAK).

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil yang berkesinambungan dalam jangka panjang dengan jumlah penduduk ideal dengan daya dukung wilayah. Struktur penduduk seimbang (*stable population*), ditandai dengan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), angka kelahiran total (TFR) saat ini 2,02 dan diharapkan pada tahun 2035 akan menjadi 1,96 per wanita. Sementara jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohor hipotesis dari 1000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya atau disebut

*Net Reproduction Rate* (NRR) saat ini 0,98 dan akan menjadi 0,95 per wanita pada tahun 2035.

Rasio beban ketergantungan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2017 telah mencapai 45,3. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan produktivitas sumberdaya manusianya sudah tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan semakin rendah. Kabupaten Bantul Dengan demikian maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh usia produktif. Kabupaten Bantul saat ini telah menikmati *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Pada tahun 2030, rasio beban ketergantungan penduduk Bantul diproyeksikan akan mencapai 49. Oleh karena itu, jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan peningkatan investasi pendidikan. Selepas tahun 2030 sampai dengan tahun 2035, rasio beban ketergantungan penduduk Bantul telah lebih dari 50 persen.

Keberhasilan program keluarga berencana dapat diukur dari tingginya angka pemakaian kontrasepsi. Capaian CPR Kabupaten Bantul tahun 2017 telah mencapai 75,95 persen dan angka tersebut lebih tinggi dari target nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bantul. Kondisi ini menunjukkan program perencanaan keluarga berencana di Kabupaten Bantul perlu lebih ditingkatkan kembali. Mengacu pada hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bantul 2017-2035, CPR akan meningkat menjadi 80,16. Agar bisa mewujudkan capaian CPR tersebut, maka salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) tentang program keluarga berencana.

## 3.2 Kualitas Penduduk

Dari sisi pendidikan target utama adalah meningkatkan harapan lama sekolah. Saat ini angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bantul telah mencapai 14,73 tahun dan diharapkan pada tahun 2035 bisa berada pada angka 18,28 tahun. Indikator pendidikan lainnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Saat ini APK untuk jenjang pendidikan SD mencapai 98,2 persen dan diproyeksikan tahun 2035 bisa sebesar 120,82 persen. Berikutnya adalah APK jenjang SMP/ sederajat saat ini sebesar 99,23 persen dan akan meningkat menjadi 126,63 persen dan APK jenjang SMA sederajat dari 94,18 persen saat ini menjadi 126,57 persen di tahun 2035. Demikian juga dengan APM diharapkan akan selalu meningkat, seperti APM untuk SD saat ini 88,68 persen dan akan meningkat menjadi 102,9 persen di tahun 2035. Untuk jenjang SMP saat ini APM telah mencapai 76,60 persen dan diharapkan tumbuh menjadi 90,72 persen dan jenjang SMA saat ini sebesar 66,41 persen menjadi 86,55 persen di tahun 2035.

Angka harapan hidup dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Bantul saat ini sudah mencapai 73,56 tahun dan diharapkan bisa mencapai 75,11 di tahun 2035. Indikator kesehatan selanjutnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Data terakhir menunjukkan AKB di Kabupaten Bantul sebesar 8,32 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2017 dan diupayakan turun menjadi 4,96 per kelahiran hidup pada tahun 2035. Hal yang sama juga terjadi pada AKI dengan besaran 72,85 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 32,29 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2035. Indikator kesehatan lainnya adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan tingginya

derajat kesehatan masyarakat. Saat ini, AHH di Kabupaten Bantul telah mencapai 73,56 tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 75,11 tahun pada 2035 nanti.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari aspek sumber daya manusia, diketahui penduduk kategori miskin di Kabupaten Bantul masih besar yakni 14,07 persen di tahun 2017. Angka kemiskinan tersebut lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional yang mencapai 10,12 persen di tahun 2017. Diharapkan angka kemiskinan tersebut turun menjadi 8,13 persen pada tahun 2035. Indikator kualitas sumber daya manusia lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan perkembangan yang sangat baik dari tahun ke tahun hingga tahun 2017 sudah mencapai 78,67. IPM tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 70,81 di tahun 2017. Dalam konteks daya saing, sumber daya manusia di Kabupaten Bantul saat ini berada pada kondisi menengah dan diharapkan pada tahun 2035 telah mencapai 83,40. Aspek pertumbuhan ekonomi juga diharapkan menunjukkan perbaikan yang juga baik. Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul saat ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen sedikit berada diatas angka nasional (5,07 persen), tetapi masih lebih rendah dibanding DIY (5,26 persen). Harapannya ekonomi Kabupaten Bantul akan tumbuh menjadi 6,44 persen di tahun 2035.

### 3.3 Kondisi Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntutan keluarga dalam menjalani roda-roda kehidupannya untuk mencapai keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial.

### 3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, sehingga pertumbuhan penduduk positif tidak saja terjadi kecamatan tertentu saja. Isu urbanisasi menjadi hal perlu mendapatkan perhatian yang serius agar penduduk tidak melakukan perpindahan ke wilayah perkotaan. Untuk itu perlu adanya pengembangan pusat ekonomi baru persebaran penduduk dapat merata.

### 3.5 Database Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

1. tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang terpadu sesuai dengan kebutuhan
2. tersusunnya sistem *database* kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

### 3.6 Permasalahan dan Tantangan

Penduduk di Kabupaten Bantul mengalami perubahan struktur ditandai dengan rasio beban ketergantungan penduduknya dibawah yaitu 45 tahun 2017. Kabupaten Bantul akan menikmati dekade jendela peluang (*window of opportunity*) sampai dengan tahun 2030 dengan rasio ketergantungan mencapai 49. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan jendela peluang tersebut dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Disamping itu, laju pertumbuhan Kabupaten Bantul dapat dipertahankan dalam angka yang relatif stabil yaitu dibawah 1 (satu) persen. Penduduk usia produktif mendominasi struktur umur sebagai akibat fertilitas dan mortalitas yang semakin menurun. TFR Kabupaten Bantul berada kondisi stabil rendah, saat ini tingkat fertilitas berada pada angka 2,02 dan perlu upaya yang keras agar turun menjadi 1,96 per wanita. Tantangan dalam menekan TFR agar stabil rendah adalah meningkatkan program keluarga berencana dan mendorong pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. Kondisi saat ini CPR di Kabupaten Bantul masih berada pada angka 75,95 persen. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan CPR tersebut menjadi 80,16 persen pada tahun 2035

Dari aspek sumber daya manusia, diketahui angka harapan sekolah penduduk Kabupaten Bantul dari tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah saat ini mencapai 14,73, dapat diartikan bahwa penduduk mempunyai harapan bisa menyelesaikan sekolahnya sekitar 15 tahun atau setara dengan Diploma III. Angka harapan lama sekolah tersebut diharapkan bisa mencapai 18,28 tahun atau setara dengan Strata-1 atau Strata-2. Hal ini menjadi tantang tersendiri, karena untuk dapat mewujudkan harapan sekolah tersebut butuh perjuangan yang tidak mudah. Sementara dari aspek APK dari jenjang SD sampai dengan SMA belum mencapai 100 persen, artinya masih ada anak usia 7-18 tahun yang tidak

bersekolah lagi saat ini. Oleh karena itu, perlu upaya untuk dapat mewujudkan APK bisa lebih dari 100 persen pada tahun 2035. Kondisi yang sama terjadi pada APM dari mulai jenjang SD sampai dengan SMA saat juga masih jauh dari APK. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mampu meningkatkan APM tersebut untuk semua jenjang tumbuh secara signifikan di tahun 2035.

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul cukup baik, ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Bantul. Saat ini AHH mencapai 73,56 tahun dan diharapkan bisa mencapai 75,11 di tahun 2035. Agar AHH tersebut bisa meningkat, maka perlu upaya peningkatan aspek kesehatan seperti peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis yang terampil. Aspek kesehatan berikutnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang juga memperlihatkan penurunan dan saat ini telah mencapai 72,85 per 100.000 kelahiran hidup. Perlu upaya tidak kenal lelah untuk bisa menurunkan AKI tersebut menjadi setengahnya di tahun 2035. Indikator lainnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang juga menunjukkan penurunan, saat ini mencapai 8,32 per 1.000 kelahiran. Tantangannya adalah bagaimana menurunkan AKB tersebut menjadi setengahnya pada tahun 2035 sebesar 4,96. Penurunan mortalitas tersebut tidak terlepas dari peningkatan mutu dan pelayanan di bidang kesehatan. Disamping itu, digulirkannya berbagai program kesehatan untuk ibu dan anak juga berdampak terhadap penurunan mortalitas di Kabupaten Bantul. Program tersebut dilakukan dengan keterpaduan lintas program meliputi program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Pemberian Makanan Tambahan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bantul juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Penduduk miskin di Kabupaten Bantul masih besar yakni 14,07 persen di tahun 2017 lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional yang mencapai 10,12 persen. Perlu solusi yang

komprehensif untuk bisa menurunkan angka kemiskinan tersebut secara nyata menjadi 8,13 persen pada tahun 2035. Dari sisi yang lain, meskipun angka kemiskinan masih cukup tinggi, namun Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan perkembangan yang sangat baik. IPM saat ini berada pada angka 78,67 dan jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 70,81. Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan menunjukkan perbaikan dengan meningkatkan pertumbuhan sebesar 5,1 persen menjadi 6,44 persen di tahun 2035. Tantangannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Bantul perlu diperkuat melalui keterpaduan program antar OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Peningkatan daya saing tenaga kerja dilakukan melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan berbagai program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja, program bantuan pendidikan oleh dinas pendidikan, program pencegahan kasus gizi buruk dan mengurangi Resiko kematian ibu dan anak oleh dinas kesehatan, program sosial oleh dinas sosial. Demikian pula dengan program pengendalian penduduk yang telah berjalan lama melalui KB (Keluarga Berencana). Berbagai macam program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya saing penduduknya. Hal itu antara lain dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini.

#### 1. Penurunan Fertilitas dan Peningkatan Prevalensi KB

TFR Kabupaten Bantul masih dalam kondisi stabil rendah, namun prevalensi pemakaian alat kontrasepsi baru mencapai 75,95 persen. Kondisi ini akan menyebabkan angka fertilitas akan kembali meningkat. Maka optimalisasi program keluarga berencana harus selalu didorong, salah satunya adalah pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur.

## 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator yang penting untuk menilai kualitas sumberdaya manusia. Perlu adanya perbaikan dalam sektor pendidikan agar angka harapan lama sekolah, APK, dan APM dapat semakin ditingkatkan. Maka program pendidikan perlu diupayakan untuk mengurangi terjadinya kasus anak usia sekolah yang putus sekolah (*drop-out*).

## 3. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. AKI di Kabupaten Bantul sangat dinamis selama kurun waktu 2013-2017, namun dalam dua tahun terakhir yaitu 2016-2017 terjadi penurunan AKI yang sangat signifikan. Demikian juga dengan Angka Kematian Bayi juga menunjukkan penurunan yang cukup baik selama kurun waktu 2013-2017. Kondisi ini menguntungkan Kabupaten Bantul karena kesehatan ibu dan bayi menjadi modal untuk mempersiapkan generasi yang sehat sehingga mampu berprestasi dan bersaing di masa depan.

## 4. Penurunan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang baik yaitu mengalami penurunan dari ke tahun. Hanya saja penurunan angka kemiskinan tersebut belum terlalu optimal karena perubahan yang terjadi masih rendah. Aspek yang cukup mendukung terjadinya penurunan angka kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, bahkan pertumbuhan yang terjadi melebihi angka nasional dan DIY. Namun demikian, koefisien gini masih sebesar 0,3800 yang masuk kategori sedang.

## 5. Kualitas Sumberdaya Manusia

Indikator kualitas sumberdaya manusia lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia juga mencatat peningkatan yang baik, tahun 2017 tercatat sebesar 78,67. Angka IPM tersebut masuk dalam kategori tinggi yaitu nilai IPM antara 70-80. IPM Kabupaten Bantul diharapkan mampu menembus kategori sangat tinggi pada tahun 2035 dengan melakukan upaya peningkatan pada komponen penyusun IPM. Komponen tersebut antara lain adalah harapan lama sekolah, usia harapan hidup, dan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

# Bab

# 4

## **Roadmap Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul**

Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Bantul akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

### **4.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk**

*Roadmap Grand Design* Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Bantul mencakup kurun waktu 2018-2035 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Berikut ini *roadmap* pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Bantul antara tahun 2018-2035.

**Tabel 4.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Bantul Tahun 2018-2035**

No	Sasaran	Tahun				
		2018	2020	2025	2030	2035
1	Jumlah penduduk	927.181	951.792	993.587	1.035.975	1.075.635
2	LPP (dalam persen)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
3	TFR	2,02	2,01	1,99	1,98	1,96
4	<i>Dependency Ratio</i>	45	45	45	49	52
5	CPR	75,95	76,64	77,79	78,97	80,16

Sumber: Disdukcapil, 2018 diolah

## 4.2 Roadmap Pengembangan Kualitas Penduduk

Sebagaimana tersebut di dalam teori mutu modal manusia, bahwa kualitas manusia ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas manusia. Oleh karena itu, terkait dengan *road map* kualitas penduduk di Kabupaten Sleman, maka dikelompokkan dalam tiga indikator pokok yakni indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi.

*Roadmap* Indikator Pendidikan di Kabupaten Sleman 2015 - 2035 tersaji pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Roadmap Pengendalian Kualitas Penduduk Bantul Tahun 2018-2035**

No	Sasaran	Tahun				
		2018	2020	2025	2030	2035
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73	15,80	16,55	17,39	18,28
2	Angka Partisipasi Kasar					
	SD	98,20	101,65	107,68	114,06	120,82
	SMP/Sederajat	99,23	103,35	110,59	118,34	126,63
	SMA/Sederajat	94,18	99,02	107,46	116,62	126,57
3	Angka Partisipasi Murni					
	SD	88,68	90,92	94,77	98,79	102,99
	SMP/Sederajat	76,60	78,79	82,58	86,56	90,72
	SMA/Sederajat	66,41	69,41	74,71	80,41	86,55
4	Angka Kematian Ibu	72,85	63,61	50,74	40,48	32,29
5	Angka Kematian Bayi	8,32	7,63	6,61	5,72	4,96
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,10	5,30	5,66	6,03	6,44
7	Angka Kemiskinan	14,07	12,84	11,03	9,47	8,13
8	Indeks Pembangunan Manusia	78,67	79,44	80,74	82,06	83,40

Sumber: Data BPS, 2018 diolah

### 4.3 Roadmap Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan antara lain.

- Menurunnya proporsi keluarga miskin menjadi 16 persen
- Mantapnya pengelolaan kegiatan ketahanan keluarga pada keluarga yang sesuai dengan siklusnya kelompok percontohan per-kecamatan bertambah BKB (Bina Keluarga Balita) , BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia)

- Meningkatnya pertumbuhan kelompok UPPKS 1.625
- Meningkatnya anggota UPPKS yang menjadi peserta KB lebih dari 75 persen

**Tabel 4.3 Roadmap Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul 2018-2035**

Road Map	Tahun			
	2018 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
<b>Membangun Keluarga yang berkualitas</b>				
• Membangun keluarga berdasarkan perkawinan yang sah	xx	xxx	xxxx	xxxxx
• Menurunkan angka perceraian	xx	xxx	xxxx	xxxxx
• Kegiatan Bina Keluarga	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
<b>Membangun keluarga yang berketahanan</b>				
• Peningkatan Legalitas Keluarga	x	xxxx	xxxx	xxxx
• Program Keluarga Berencana	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxx
• Program peningkatan kecukupan pangan dan gizi	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
• Program peningkatan ekonomi keluarga	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

#### 4.4 Roadmap Penataan dan Pengarahan Mobilitas

Penataan dan pengarahan mobilitas dilakukan dengan merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009. Pada pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan diantara keduanya. Sedangkan Daya Tampung

Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi dan atau komponen yang lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah. Selanjutnya *roadmap* penataan dan pengarahannya di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, maka perlu upaya pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

**Tabel 4.4 Roadmap Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bantul 2018–2035**

Pokok Kebijakan	Tahun			
	2018-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
1. Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan pusat industri rumah tangga berbasis kerajinan dalam upaya mendukung kedudukan Kabupaten Bantul sebagai pendukung Kebudayaan, Pariwisata, dan Pendidikan	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2. Peningkatan kerja sama antardaerah dalam mengatur migrasi internal yang harmonis, bersinergi dengan kabupaten lain, dan berwawasan lingkungan	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
3. Penyusunan Sistem Informasi Penduduk rentan administrasi, yakni yang berasal dari luar Kabupaten Bantul secara transparan dan terpadu	xxx	xxxx	xxxxx	xxxxx
4. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan penduduk lokal dengan pendatang	xxx	xxxx	xxxxx	xxxxx
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul pada kecamatan-kecamatan yang terletak di perbatasan	xx	xxx	xxx	xxx
6. Pengarahan dan fasilitasi mobilitas penduduk melalui program Transmigrasi dalam berbagai bentuk	xxx	xxxxx	xxxx	xxx
7. Pengembangan migrasi internasional melalui G to G program demi meningkatkan kualitas SDM yang berstandar internasional	xxx	xxx	xxxx	xxxxx
8. Pendataan tenaga kerja luar daerah sebagai basis perencanaan angkatan kerja antar daerah	x	xxx	xxxx	xxxxx

## 4.5 Roadmap Pembangunan Basis Data Kependudukan

Data dan informasi kependudukan memiliki fungsi sebagai dasar/pondasi dalam kerangka *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dalam rangka itulah, kebijakan umum bidang data dan informasi kependudukan diarahkan kepada aspek pengembangan *data base* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi, mudah diakses oleh para pemangku

kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

**Tabel 4.5 Roadmap Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan Kabupaten Bantul 2018-2035**

No	Road Map	Tahun			
		2018-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
1	Penataan Database Kependudukan				
	1A Pemetaan pembangunan database kependudukan dan SIAK bagi pembangunan data terpadu				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemetaan potensi pembangunan dan kebutuhan data</li> <li>▪ Analisis kebutuhan data untuk setiap bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dsb)</li> <li>▪ Desain kebutuhan integrasi data setiap instansi ke dalam database SIAK</li> </ul>	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	1B Kerja sama antar lembaga/instansi terkait informasi kependudukan dan sektoral				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan MoU antara dinas kependudukan dan dinas sektoral lainnya</li> <li>▪ Sinkronisasi data antara data dari dinas kependudukan dengan dinas sektoral lainnya (dinas pendidikan, dinas kesehatan,dll)</li> </ul>	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2	Pengembangan SDM, jaringan, perangkat dan aplikasi merger data kependudukan dan data sektoral lainnya				
	2A Perangkat dan jaringan untuk pengintegrasian dan pengelolaan informasi kependudukan dan sektoral	xx	xxxxx	xxxxx	xx
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisis kebutuhan datacenter terhadap kebutuhan database kependudukan</li> <li>▪ Pengadaan atau penambahan database server dan web server</li> <li>▪ Pengadaan backup server untuk data recovery</li> <li>▪ Penambahan kapasitas saluran internet di <i>data center</i></li> </ul>				
	2B Pengembangan aplikasi integrasi dan pengelolaan informasi kependudukan dan sektoral	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
3	Pemetaan SDM yang diperlukan untuk pengelolaan SIAK dan informasi sektoral	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No	Road Map		Tahun			
			2018-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
4		Peningkatan pemahaman pengelola di instansi penyedia dan pengguna terhadap pengembangan sistem	x	xxxxx	xxxxx	xxxxx
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan SDM pengelola sistem informasi untuk pemetaan pembangunan</li> <li>▪ Pelatihan SDM pengelola sistem informasi untuk pemetaan layanan informasi di setiap instansi</li> <li>▪ Pengembangan kapasitas petugas registrasi kelurahan dan kecamatan</li> </ul>				
5		Pendayagunaan				
	5A	Penyusunan rencana pengembangan aplikasi terpadu berbasis data kependudukan	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisis prioritas kebutuhan aplikasi terpadu dan penjadwalan implementasi</li> <li>▪ Fasilitasi pengembangan prototipe aplikasi untuk bidang sektoral (misal: pendidikan dan kesehatan)</li> <li>▪ Sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan</li> <li>▪ Pengembangan prototipe sistem informasi pemanfaatan data kependudukan dan sektoral berbasis mobile</li> </ul>				
	5B	Penyediaan informasi kependudukan dan sektoral bagi lembaga/instansi dan publik	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	5C	Monitoring dan evaluasi untuk pengembangan pendataan, integrasi-pengelolaan, dan pendayagunaan informasi kependudukan dan sektoral	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
6		Pengelolaan Data dan Informasi (Kependudukan dan Sektoral)	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	6A	Data Sektoral (eksosbud, dll)	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	6B	Data Penduduk (Akta kelahiran, KIA, Akta Nikah, KTP-El, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan data kependudukan lainnya)	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

*Roadmap* pembangunan basis data kependudukan terbagi menjadi dua. Pertama adalah *roadmap* penataan dan pengelolaan database kependudukan serta kedua adalah *roadmap* pengelolaan dokumen kependudukan.

*Roadmap* pembangunan data dan informasi kependudukan kedua adalah tentang penataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Permasalahan pada aspek penataan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah capaian kepemilikan dokumen penduduk yang belum seluruhnya 100 persen. Persentase ini didapatkan dari hasil bagi dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen dengan jumlah penduduk yang seharusnya mendapatkan layanan dokumen kependudukan ini. Dokumen kependudukan yang dimaksud dalam bagian ini meliputi KTP-El, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Identitas Anak (KIA).

**Tabel 4.6 Roadmap Pengelolaan Dokumen Kependudukan Kabupaten Bantul 2018-2035**

Dokumen Kependudukan (dalam persen)	Tahun			
	2018-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
Kepemilikan KTP Elektronik	99 persen	99,2 persen	99,4 persen	99,6 persen
Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	99 persen	99,5 persen	99,7 persen	99,9 persen
Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	96 persen	97 persen	98 persen	99 persen
Kepemilikan Akta Kematian	50 persen	60 persen	80 persen	95 persen
Kepemilikan Akta Nikah	50 persen	60 persen	80 persen	95 persen
Kepemilikan Kartu Identitas Anak	40 persen	82 persen	97 persen	99 persen

# Bab

# 5

## Pokok-Pokok Kebijakan Kependudukan

Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui beberapa cara, salah satunya melalui pembangunan kependudukan. Pembangunan kependudukan dilakukan dengan cara pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan pengembangan kualitas penduduk. Berangkat dari hal itu, penyediaan data dan informasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada Bab 5 ini akan diuraikan tentang pokok-pokok kebijakan kependudukan yang terdiri dari kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, kebijakan pengembangan kualitas penduduk, kebijakan pembangunan keluarga, kebijakan penataan dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta kebijakan pembangunan *basis data* kependudukan.

### 5.1 Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tujuan dari pengendalian jumlah penduduk adalah kesesuaian antara jumlah penduduk dengan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada atau dengan kata lain daya dukung lingkungan. Penduduk tanpa pertumbuhan menjadi tujuan utama pengendalian jumlah penduduk. Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi dari 75,96 persen saat ini menjadi 80,16 persen.

2. mengarahkan pada alat kontrasepsi mantap (Kontap) bagi pria dan wanita
3. menurunkan TFR dari 2,02 saat ini menjadi 1,96
4. meningkatkan pendewasaan usia perkawinan (PUP) atau usia ideal perkawinan
5. meningkatkan usia ideal untuk melahirkan
6. mempertahankan jumlah ideal anak
7. mempertahankan jarak ideal kelahiran anak
8. menekan angka kehamilan tidak diinginkan
9. mengarahkan mobilitas penduduk

## **5.2 Kebijakan Pengembangan Kualitas Penduduk**

Kualitas penduduk berkaitan erat dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk diperlukan intervensi di tiga aspek pembangunan manusia tersebut, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kualitas penduduk meliputi tiga aspek penting yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mendukung Pembangunan Sumberdaya Manusia. Diantara tiga aspek tersebut pembangunan ekonomi menjadi kunci peningkatan kualitas penduduk. Bidang ekonomi yang masih perlu didalami adalah ketimpangan dan jumlah penduduk miskin dan aspek ketenagakerjaan baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran.

Kebijakan pengembangan kualitas di Kabupaten Bantul pada aspek ekonomi adalah sebagai berikut.

- a. peningkatan pendapatan per kapita,
- b. pengurangan ketimpangan,
- c. pengurangan angka kemiskinan,
- d. penurunan pengangguran.

e. pemberian jaminan sosial

Kebijakan pengembangan kualitas di Kabupaten Bantul pada aspek kesehatan adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan strategi kualitatif peningkatan Usia Harapan Hidup Sehat (UUHS) yaitu dengan cara:

- meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
- peningkatan status gizi
- peningkatan kualitas lingkungan
- mengendalikan penyakit menular dan tidak menular
- peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak
- peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
- penurunan morbiditas

b. menurunkan *Maternal Mortality Ratio* (MMR)

- meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak
- menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
- mengatur kehamilan yang diinginkan

Kebijakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bantul pada aspek pendidikan adalah sebagai berikut.

a. peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah

b. pengurangan Angka Putus Sekolah

c. peningkatan akses pendidikan lewat perluasan pemberian beasiswa PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi, serta pendidikan khusus

d. peningkatan pendidikan bagi perempuan

- e. peningkatan dan pengembangan pendidikan informal di lingkungan dan keluarga

### 5.3 Kebijakan Pembangunan Keluarga

Tujuan dari pembangunan keluarga yang terdapat dalam Peraturan Presiden No 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pembangunan keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni. Untuk mewujudkan hal tersebut maka beberapa kebijakan pokok yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan sah
3. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara
4. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga, berketahanan sosial dan kesejahteraan sosial
5. pembangunan ketahanan keluarga untuk menjaga ketahanan keluarga

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan rekayasa sosial yang terdiri dari:

1. penataan struktur keluarga;
2. penguatan relasi sosial keluarga;
3. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
4. perluasan jaringan sosial keluarga.

Penataan struktur keluarga dilakukan melalui pembinaan untuk setiap struktur dalam keluarga. Penguatan relasi sosial dimaksudkan untuk menjaga dan

membangun hubungan dengan anggota keluarga yang lainnya. pengembangan transformasi sosial keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi lebih baik berketahanan dan sejahtera. Perluasan jaringan sosial keluarga dimaksudkan untuk membangun dan menjaga hubungan dengan kerabat/relasi/rekanan lainnya.

## **5.4 Kebijakan Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

Persebaran dan mobilitas penduduk menjadi pilar strategis untuk mewujudkan distribusi penduduk yang merata dengan memperhatikan daya tampung wilayah. Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang terus berkembang dan mendapatkan luberan penduduk dari Kota Yogyakarta. Akibatnya jumlah penduduk terus meningkat dan terdapat kecenderungan migrasi masuk tinggi.

Kebijakan pokok terkait pengarahan mobilitas di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

1. menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. menciptakan pertumbuhan dan kuantitas penduduk seimbang
3. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
4. meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
5. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah
6. pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan dan kebutuhan pasar
7. meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pembangunan
8. mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru

Dibutuhkan strategi–strategi untuk mencapai tujuan pengarah mobilitas yaitu (1) melakukan penataan kawasan sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah; (2) pembangunan perkotaan yang berkelanjutan; (3) kebijakan mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan non permanen; (4) pengembangan daerah sebagai wilayah penyangga; (5) melibatkan penduduk dalam pembangunan; dan (6) integrasi penduduk pendatang dan penduduk setempat, kerjasama antar daerah, dan peningkatan investasi.

## **5.5 Kebijakan Pembangunan Basis Data Kependudukan**

Posisi pembangunan manajemen informasi kependudukan yaitu sebagai fungsi dari pembangunan informasi kependudukan. Informasi kependudukan merupakan penggabungan dari dua hal yaitu administrasi kependudukan (data perseorangan penduduk dan peristiwa penting) serta data sektoral (kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial). Pembangunan manajemen informasi kependudukan mencakup tiga hal pokok sebagai berikut.

- a. pendataan dan penyusunan informasi kependudukan berbasis teknologi yang terintegrasi
- b. integrasi data dan informasi kependudukan dari lembaga-lembaga sektoral lain berbasis teknologi
- c. pendayagunaan atau pemanfaatan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi

# Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 1995. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta
- BPS. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. Jakarta
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Mankiw, N. Gregory, 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah, Peter Wilson. 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat
- Mantra. Ida Bagus. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Munir, Rozy .2000. *Migrasi Dalam Dasar-Dasar Demografi Disunting Oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Nanga, Muana., 2001. *Ekonomi Makro Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- \_\_\_\_\_. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
- \_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
- \_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang penyusunan Grand Design terkait Pembangunan Kependudukan

Rusli, S. 1996. *Pengantar Ilmu Kependudukan: Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES

Sarwono, Sarlito. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gramedia

Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Todaro, M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Waluyo, Dwi Eko. 2003. *Teori Ekonomi Makro*. Malang: UMM